

Katalog : 7203005.51

# STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2014-2018



<https://bali.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BALI**

**STATISTIK KEUANGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
SE-PROVINSI BALI 2014-2018**





## STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2014 – 2018

ISSN : 2477-7773

No. Publikasi : 51540.1908

Katalog : 7203005.51

Ukuran Buku : 21 cm x 14,8 cm

Jumlah Halaman : xii + 56 halaman

Naskah : Bidang Statistik Distribusi

Penyunting : Bidang Statistik Distribusi

Disain Cover : Bidang Statistik Distribusi

Diterbitkan Oleh : ©BPS Provinsi Bali

Dicetak Oleh : -

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.*



**Tim Penyusun**

**Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  
Se-Provinsi Bali 2014-2018**

**Penanggung Jawab Umum:**

Ir. Adi Nugroho, M.M.

**Penanggung Jawab Teknis:**

I Gede Nyoman Subadri, SE.

**Koordinator:**

I Made Putra Astawa, SE.

**Anggota:**

I Gede Arya Agus Yogantara, SST.

**Layout:**

I Gede Arya Agus Yogantara, SST.



<https://bali.bps.go.id>



## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memenuhi salah satu tujuan Reformasi Birokrasi (RB), pilar kelima berupa pelayanan statistik yang berkualitas, Badan Pusat Statistik Provinsi Bali kembali menerbitkan Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali. Data yang disajikan dalam publikasi ini merupakan hasil kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik.

Publikasi ini menyajikan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Realisasi APBD pemerintah kabupaten/kota se-Bali dalam kurun waktu 2014 – 2018. Ulasan singkat mengenai perkembangan keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali selama tahun 2014 – 2018 juga disertakan di dalamnya. Publikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi sehubungan dengan kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Dengan menyadari akan ketidaksempurnaan dari publikasi ini, kami dengan senang hati menerima masukan, saran, dan kritik yang membangun demi kesempurnaan publikasi ini di waktu yang akan datang.

Denpasar, Oktober 2019  
Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Bali

**Ir. Adi Nugroho, M.M.**







# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Sistematika Penulisan .....	4
<b>II. METODOLOGI</b>	
2.1 Ruang Lingkup .....	5
2.2 Metode Pengumpulan Data .....	5
2.3 Konsep dan Definisi.....	5
<b>III. ULASAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI 2014 – 2018</b>	
3.1 Gambaran Umum .....	21
3.2 Pendapatan Daerah.....	25
3.3 Belanja Daerah .....	30
<b>LAMPIRAN TABEL .....</b>	<b>35</b>







<https://bali.bps.go.id>



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	37
Tabel 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	38
Tabel 3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	39
Tabel 4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	40
Tabel 5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	41
Tabel 6. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	42
Tabel 7. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	43
Tabel 8. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	44
Tabel 9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	45
Tabel 10. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	46
Tabel 11. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	47





Tabel 12. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	48
Tabel 13. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	49
Tabel 14. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	50
Tabel 15. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	51
Tabel 16. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	52
Tabel 17. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	53
Tabel 18. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	54
Tabel 19. Ringkasan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali, 2014 – 2018 (000 Rp) .....	55
Tabel 20. Ringkasan Total Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali, 2014 – 2018 (000 Rp)..	56





## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota.....	21
Gambar 2. Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2018 (triliun rupiah).....	22
Gambar 3. Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen).....	23
Gambar 4. Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen).....	24
Gambar 5. Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen).....	26
Gambar 6. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen).....	27
Gambar 7. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemeritah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen).....	28
Gambar 8. Rata - Rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemeritah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen).....	29





Gambar 9.	Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen) .....	30
Gambar 10.	Rata - Rata Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen) .....	31
Gambar 11.	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen) .....	33
Gambar 12.	Rata - Rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen) .....	34

<https://bali.bps.go.id>





## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Otonomi Daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini didasari asumsi bahwa Pemerintah Daerah merupakan institusi yang paling mengerti/memahami kondisi daerahnya sendiri. Anggaran Pemerintah Daerah tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang juga merupakan instrumen fiskal Pemerintah Daerah dalam mengendalikan perekonomian di wilayahnya. Melalui instrumen tersebut Pemerintah Daerah dapat melakukan stimulus terhadap perekonomian di wilayahnya guna memicu perkembangan perekonomian wilayahnya.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah melalui Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, terdapat enam fungsi APBD yang wajib diterapkan dalam setiap penyusunannya. Pertama, fungsi otorisasi yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar





untuk merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Kedua, fungsi perencanaan yang bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Ketiga, fungsi pengawasan yang mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Keempat, fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah. Kelima, fungsi distribusi yang memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Keenam, fungsi stabilitasi yang memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Sejalan dengan fungsi APBD dalam hal perencanaan, pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya diharapkan dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih tepat berdasarkan data potensi suatu wilayah dari sisi pendapatan dan pengeluarannya. Potensi dari sisi pendapatan dapat dimanfaatkan sebagai tolok ukur suatu pemerintahan dalam menentukan kebijakan berdasarkan besaran pendapatan yang diperoleh dalam suatu daerah. Sementara itu, dari sisi pengeluaran dapat menunjukkan potensi pengeluaran pemerintah yang mungkin membantu memperlihatkan ke mana pendapatan daerah akan dibelanjakan.

Terkait fungsi APBD dalam hal pengawasan, data APBD maupun realisasi APBD kiranya bermanfaat dalam melakukan evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah. Berbagai rasio keuangan dapat dihitung berdasarkan data APBD dan realisasinya





yang kemudian kami sajikan dengan harapan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak untuk menilai kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Rasio – rasio keuangan tersebut antara lain rasio ketergantungan daerah, rasio belanja pegawai terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, dan rasio efektivitas keuangan daerah. Rasio – rasio keuangan tersebut kiranya bisa bermanfaat untuk menilai sejauh mana pengelolaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Publikasi ini disusun dengan harapan memenuhi kebutuhan akan data statistik keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali. Disajikan pula gambaran mengenai anggaran daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2014 – 2018 serta analisis kondisi fiskal atau keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali berdasarkan data APBD maupun realisasi APBD tahun anggaran 2014 – 2018.

## **1.2. Tujuan**

Tujuan penyusunan publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2014 – 2018, yaitu untuk memenuhi kebutuhan data keuangan (APBD dan realisasi APBD) pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali tahun 2014 – 2018 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.







### 1.3. Sistematika Penulisan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2014 – 2018 merupakan salah satu dari berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. Sistematika penulisan publikasi ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II Metodologi, yang terdiri dari Ruang Lingkup, Metode Pengumpulan Data, dan Konsep/Definisi.
3. BAB III Ulasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2014 – 2018.
4. Lampiran Tabel-tabel





## II. METODOLOGI

### 2.1. Ruang Lingkup

Data yang disajikan dalam publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2014 – 2018 meliputi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Tahun 2014 – 2018. Kabupaten/Kota yang dicakup meliputi seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, serta Kota Denpasar. Sementara itu, data yang dicakup merupakan data anggaran/realisasi anggaran mulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan.

### 2.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan, yaitu dengan mengkompilasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dari Kantor Bupati/Walikota di seluruh Provinsi Bali yang telah disahkan dengan Peraturan Daerah masing-masing melalui kegiatan Survei Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan setiap tahun.

### 2.3. Konsep dan Definisi

Konsep dan definisi dalam publikasi ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan





Daerah yang kemudian mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011, sebagai berikut :

#### ❖ **Pendapatan Daerah**

Pendapatan Daerah didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

#### ❖ **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### ❖ **Pajak Daerah**

Pajak daerah didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.





Penerimaan pajak daerah antara lain pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain.

❖ **Retribusi Daerah**

Retribusi daerah didefinisikan sebagai pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

❖ **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

❖ **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan, dan lain-lain.





## ❖ Dana Perimbangan

Dana perimbangan didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

## ❖ Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

### ➤ Bagi Hasil Pajak

Bagi hasil pajak didefinisikan sebagai bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

### ➤ Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

## ❖ Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai transfer dana dari pemerintah pusat ke Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan



fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian Pemerintah Daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

#### ❖ **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana alokasi khusus (DAK) didefinisikan sebagai dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

#### ❖ **Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Lain-lain pendapatan yang sah didefinisikan sebagai pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.





## ❖ **Belanja Daerah**

Belanja daerah didefinisikan sebagai semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah terdiri dari : Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung.

## ❖ **Belanja Tak Langsung**

Belanja tak langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/ kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

## ❖ **Belanja Pegawai (Tak Langsung)**

Belanja pegawai (tak langsung) didefinisikan sebagai belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.





#### ❖ **Belanja Bunga**

Belanja bunga didefinisikan sebagai belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### ❖ **Belanja Subsidi**

Belanja subsidi didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

#### ❖ **Belanja Hibah**

Belanja hibah didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/ organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

#### ❖ **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.







❖ **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa didefinisikan sebagai belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

❖ **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa didefinisikan sebagai pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

❖ **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tak terduga didefinisikan sebagai belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.





## ❖ **Belanja Langsung**

Belanja langsung didefinisikan sebagai bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah dan telah dianggarkan oleh Pemerintah Daerah.

### ❖ **Belanja Pegawai (Langsung)**

Belanja pegawai (langsung) didefinisikan sebagai pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

### ❖ **Belanja Modal**

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.

Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepuustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.





## ❖ **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

### ❖ **Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya didefinisikan sebagai bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

### ❖ **Pencairan Dana Cadangan**

Pencairan dana cadangan didefinisikan sebagai Penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

### ❖ **Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan didefinisikan sebagai semua penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal Pemerintah Daerah.





#### ❖ **Penerimaan Pinjaman Daerah**

Penerimaan pinjaman daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

#### ❖ **Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman**

Penerimaan kembali pemberian pinjaman didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

#### ❖ **Penerimaan Piutang Daerah**

Penerimaan piutang daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang berasal dari pemberian piutang daerah kepada pemerintah yang lebih tinggi maupun lebih rendah serta swasta.

#### ❖ **Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir**

Penerimaan kembali investasi dana bergulir didefinisikan sebagai semua penerimaan kembali yang berasal dari investasi dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

#### ❖ **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.





#### ❖ **Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan dana cadangan didefinisikan sebagai pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

#### ❖ **Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah didefinisikan sebagai pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

#### ❖ **Pembayaran Pokok Utang**

Pembayaran pokok utang didefinisikan sebagai pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

#### ❖ **Pemberian Pinjaman Daerah**

Pemberian Pinjaman Daerah didefinisikan sebagai pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak ketiga.





#### ❖ Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

Pos ini digunakan untuk mengetahui pembiayaan neto, yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

Selain konsep dan definisi di atas, dalam publikasi ini juga disajikan beberapa rasio yang kiranya dapat bermanfaat dalam menelaah keuangan Pemerintah Daerah. Berikut uraian dari konsep dan definisi rasio-rasio yang disajikan dalam publikasi ini, yaitu:

#### ❖ Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi fiskal yang juga merupakan rasio PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah (Mahmudi, 2010: 142). Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 dalam Bisma (2010:78), nilai derajat desentralisasi dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Sangat Kurang, berkisar antara 0 – 10 persen.
- b. Kurang, berkisar antara 10,1 – 20 persen.
- c. Sedang, berkisar antara 20,1 – 30 persen.
- d. Cukup, berkisar antara 30,1 – 40 persen.
- e. Baik, berkisar antara 40,1 – 50 persen.
- f. Sangat Baik, di atas 50 persen.





#### ❖ **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah Daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010 :142)

#### ❖ **Rasio Efektivitas Keuangan Daerah**

Analisis efektivitas pengelolaan anggaran daerah didefinisikan sebagai ratio perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dengan target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD, guna mengetahui berhasil tidaknya pencapaian tujuan anggaran Munir(2004:48). Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target PAD (dianggarkan).

#### ❖ **Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Daerah**

Didefinisikan sebagai perbandingan antara belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Tujuan penghitungan rasio ini, yaitu untuk mengetahui proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Data belanja pegawai di sini adalah penjumlahan dari belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. Rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai.





#### ❖ Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Didefinisikan sebagai perbandingan antara Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah. Rasio ini dipergunakan untuk mengukur persentase jumlah realisasi anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan fisik pembangunan dibandingkan dengan seluruh realisasi belanja. Norma penilaian menyatakan apabila hasil pengukuran lebih dari 50%, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran lebih banyak digunakan untuk kegiatan yang bersifat pembangunan fisik/infrastruktur yang membawa kearah perkembangan pembangunan daerah yang lebih baik (Sholeh,dkk: 2011).

<https://bali.bps.go.id>







<https://bali.bps.go.id>

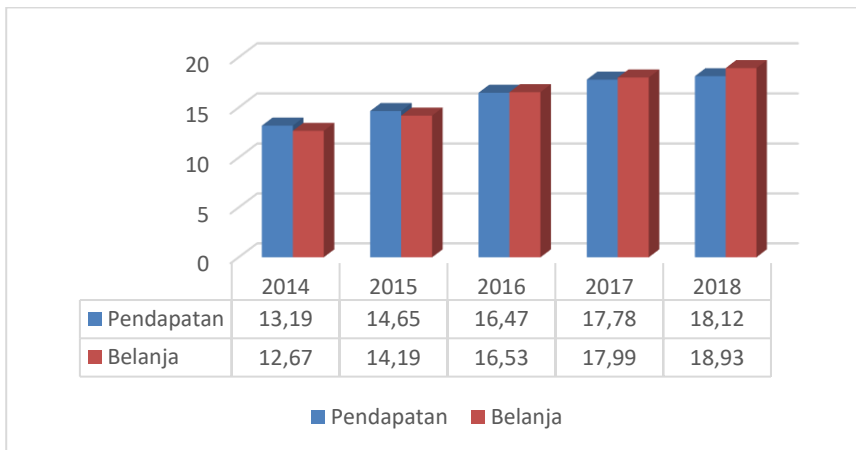


### III. Ulasan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali 2014 – 2018

#### 3.1 Gambaran Umum

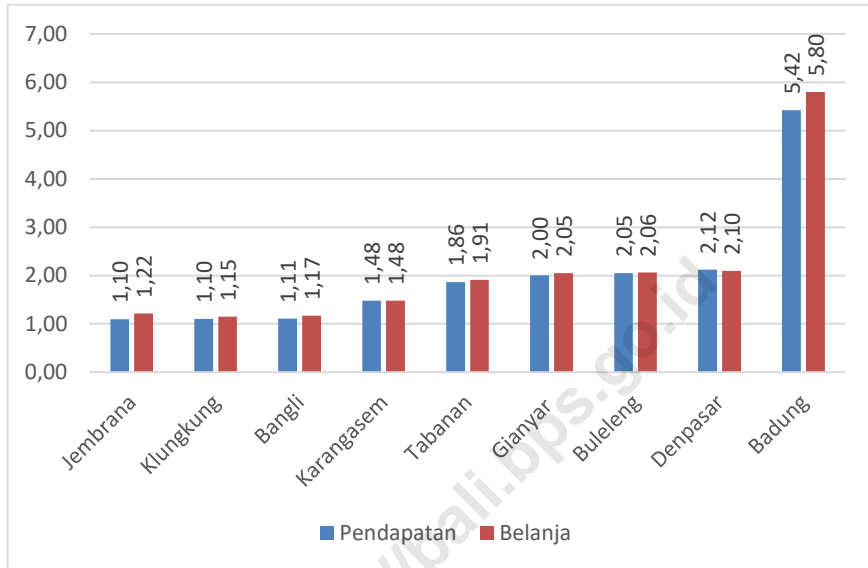
Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2014 – 2018 dari seluruh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali terlihat adanya trend kenaikan pendapatan maupun belanja daerah (gambar 1). Jumlah pendapatan Pemerintah Daerah 9 kabupaten/kota se-Provinsi Bali mencapai 13,19 triliun rupiah di tahun 2014 kemudian menjadi 18,12 triliun rupiah pada tahun 2018, jika dipersentasekan pertumbuhannya mencapai 37,38 persen atau tumbuh rata – rata 9,34 persen per tahunnya. Seiring dengan peningkatan pendapatan daerah, total belanja daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali juga mengalami kenaikan. Dalam rentang waktu 2014 – 2018, belanja daerah tumbuh dari 12,67 triliun pada tahun 2014 menjadi 18,93 triliun di tahun 2018, mengalami kenaikan sebesar 49,41 persen atau naik rata - rata 12,35 persen per tahun.

Gambar 1. Perkembangan Realisasi APBD Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (Triliun Rupiah)





Gambar 2. Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2018 (triliun rupiah)



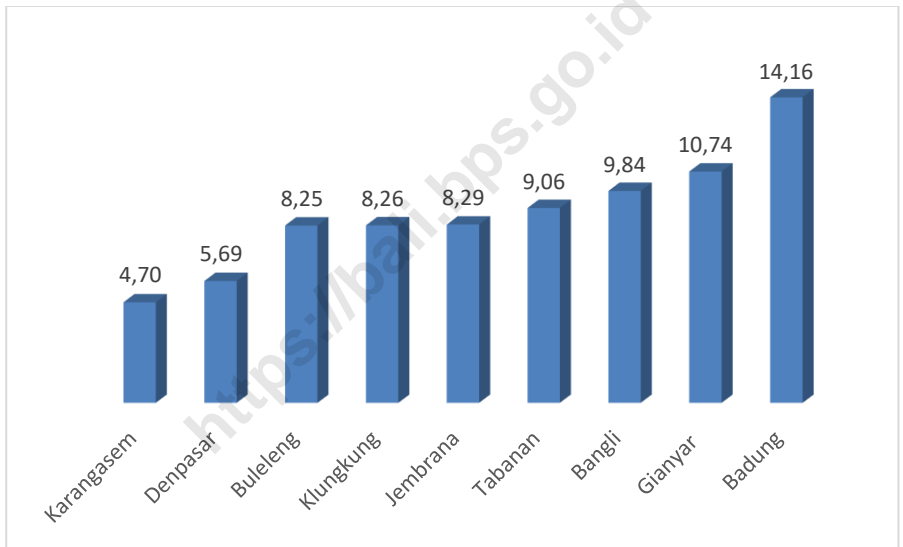
Berdasarkan realisasi pendapatan APBD di setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2018 (gambar 2), menunjukkan bahwa Kabupaten Badung masih memiliki pendapatan paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Badung tercatat merealisasikan penerimaan APBD pada tahun 2018 mencapai 5,42 triliun rupiah dan melakukan belanja sebesar 5,80 triliun rupiah. Selanjutnya disusul Kota Denpasar dan Kabupaten Buleleng yang mencapai penerimaan APBD masing-masing sebesar 2,12 triliun rupiah dan 2,05 triliun rupiah serta melakukan belanja daerah masing-masing sebesar 2,10 triliun rupiah dan 2,06 triliun rupiah. Kabupaten yang memiliki capaian realisasi APBD tahun 2018 paling rendah tercatat di Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Jembrana dengan nilai penerimaan APBD masing-masing mencapai 1,10 triliun rupiah dan belanja daerah senilai 1,15 triliun rupiah untuk Kabupaten Klungkung dan 1,22 triliun rupiah untuk





Kabupaten Jembrana. Pada tahun 2018, dari seluruh kabupaten/kota di Bali, tercatat 7 (tujuh) pemerintah kabupaten/kota yang mencatatkan realisasi pengeluaran APBD lebih besar dari realisasi pendapatannya. Kekurangan ini selanjutnya dipenuhi melalui komponen pembiayaan daerah.

Gambar 3. Rata - Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se- Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen)



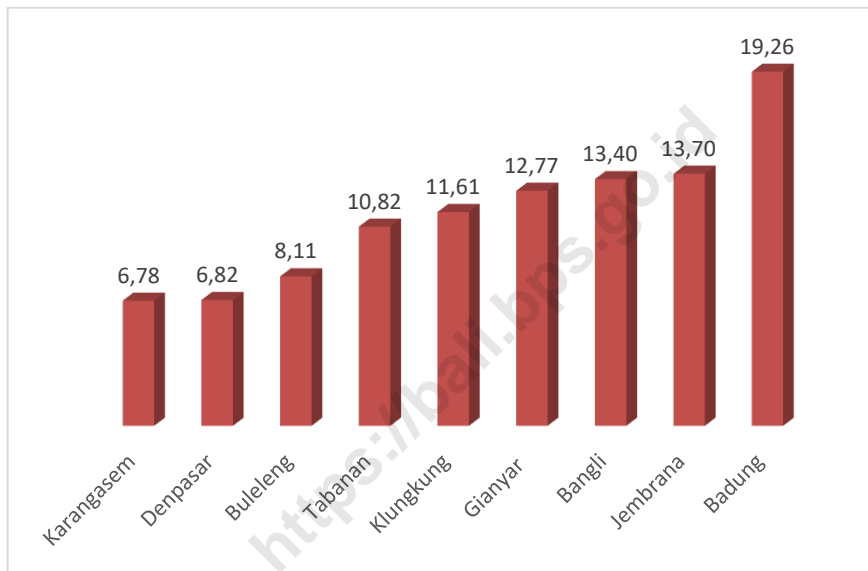
Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah di 9 kabupaten/kota se- Provinsi Bali pada periode 2014 – 2018 berada di atas delapan persen (Gambar 3). Pendapatan daerah Kabupaten Badung tercatat mencapai rata – rata pertumbuhan tertinggi di Provinsi Bali dalam periode tahun 2014 – 2018, yaitu 14,16 persen per tahun. Posisi berikutnya diduduki oleh Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Bangli dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masing-masing sebesar 10,74 persen dan 9,84 persen. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah





terendah dalam periode 2014 – 2018 tercatat di Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 4,70 persen per tahun.

Gambar 4. Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah Per Tahun Kabupaten/ Kota se- Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen)



Apabila dilihat rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun dalam rentang waktu 2014 – 2018 seperti tertuang dalam gambar 4, dapat dilihat bahwa rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun yang paling tinggi tercatat di Kabupaten Badung dengan rata-rata belanja daerah per tahun tumbuh sebesar 19,26 persen, disusul oleh Kabupaten Jembrana dan Kabupaten Bangli dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 13,70 persen dan 13,40 persen. Di sisi lain, rata-rata pertumbuhan belanja daerah per tahun paling rendah tercatat di Kabupaten Karangasem mencapai 6,78 persen.





Berdasarkan Gambar 3 dan Gambar 4, terlihat bahwa hampir semua wilayah pada periode 2014 – 2018 memiliki rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah per tahun melebihi rata-rata pertumbuhan pendapatannya. Kabupaten Buleleng menjadi satu-satunya wilayah dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan per tahunnya lebih besar dari pada rata-rata pertumbuhan pengeluaran per tahunnya.

### 3.2 Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat desentralisasi fiskal, yang dalam hal ini dimaksudkan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur keuangan daerahnya. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan luas untuk menggali potensi sumber – sumber pendapatan daerahnya dengan memungut pajak dan retribusi daerah ataupun tambahan pendapatan dari pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan asli daerah yang sah lainnya. Namun demikian, mengingat adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana kepada pemerintah daerah sebagai tambahan pendapatan daerah.

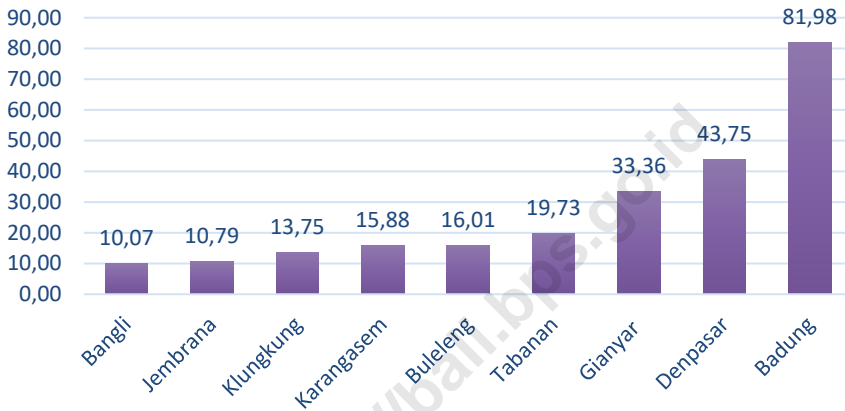
Dalam pengukuran desentralisasi fiskal dapat dilakukan melalui penghitungan derajat desentralisasi fiskal, yang merupakan rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Semakin besar derajat desentralisasi fiskal suatu daerah maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah tersebut dalam menyelenggarakan desentralisasi.





Rata-rata derajat desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2014 – 2018 dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Rata-Rata Derajat Desentralisasi Fiskal Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen)



Bila dilihat rata-rata derajat desentralisasi fiskal dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali selama tahun 2014-2018 tercatat Kabupaten Badung memiliki kemampuan tertinggi, mencapai 81,98 persen. Berdasarkan hasil penelitian Tim Litbang Depdagri bersama Fisipol UGM pada tahun 1991 yang telah dijelaskan sebelumnya pada konsep dan definisi tentang pengelompokkan nilai derajat desentralisasi, Kabupaten Badung termasuk memiliki kemampuan desentralisasi yang sangat baik. Sementara itu Kabupaten Bangli masih tercatat memiliki derajat desentralisasi fiskal paling kecil dan termasuk dalam kategori kurang. Kondisi Kabupaten lain yang mendampingi Kabupaten Bangli dengan derajat desentralisasi fiskal dalam kategori kurang, yaitu Kabupaten Jembrana, Klungkung, Karangasem, Buleleng dan Tabanan. Di sisi lain, Kabupaten Gianyar sudah termasuk memiliki kemampuan desentralisasi yang cukup, selanjutnya Kota

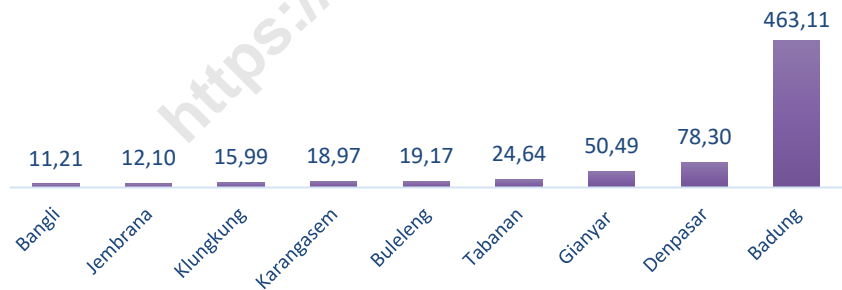




Denpasar tercatat dengan kemampuan desentralisasinya yang berada pada kategori baik.

Analisis lain yang masih terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio kemandirian keuangan daerah. Seperti dijelaskan sebelumnya, rasio ini merupakan pembagian/rasio antara nilai PAD dengan pendapatan lain yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya dan pinjaman. Tingkat kemandirian keuangan daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Bisma, 2010:77). Dalam kurun waktu 2014 – 2018, rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada gambar 6 berikut:

Gambar 6. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen)



Seperti yang disajikan pada Gambar 6, Kabupaten Badung memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah yang paling tinggi, yaitu sebesar 463,111 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki kemandirian fiskal yang paling besar dibanding kabupaten/kota lainnya, bahkan mencapai empat kali lipat pendapatan diluar PAD. Sementara itu pada kurun waktu yang sama,



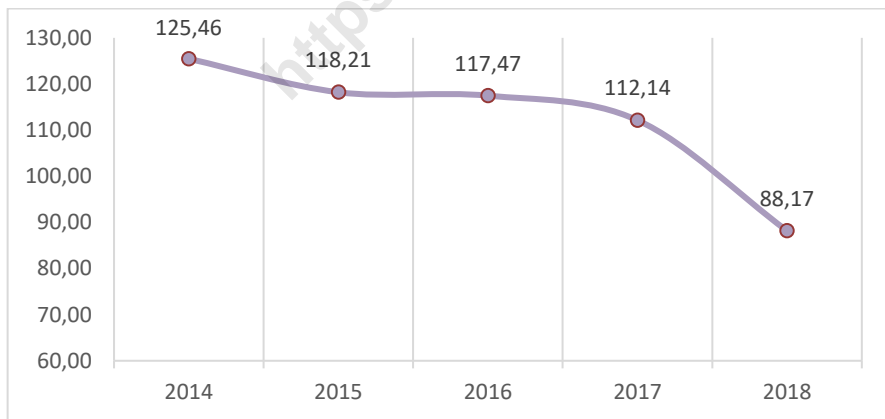




Kabupaten Bangli tercatat memiliki rata-rata rasio kemandirian keuangan yang paling rendah, hanya 11,21 persen. Hal ini kiranya menunjukkan Pemerintah Daerah Bangli masih belum mampu mandiri secara fiskal dan masih membutuhkan transfer dana dari pihak eksternal baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya guna pendanaan kegiatan pemerintahannya.

Mengingat peran PAD merupakan salah satu komponen dalam menilai kemandirian fiskal suatu wilayah, pemerintah daerah diharapkan sedapat mungkin mengelola PAD tersebut secara efektif dan efisien. Perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah terhadap target Pendapatan Asli Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan atau dikenal sebagai rasio efektivitas keuangan daerah.

Gambar 7. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen)



Secara umum, rasio efektivitas keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2014 – 2018 masih

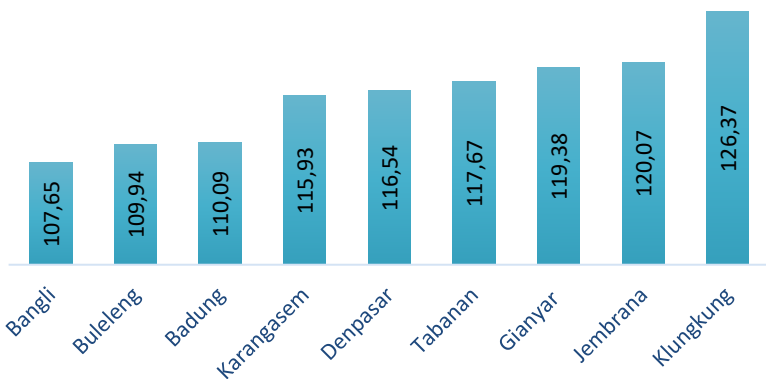


menunjukkan nilai di atas 100 yang berarti bahwa realisasi PAD selalu lebih tinggi dibandingkan target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen APBD, kecuali tahun 2018. Perkembangan rasio ini selama periode 2014 – 2018 menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2018 tercatat penurunan rasio efektivitas keuangan daerah mencapai 88,17 persen.

Bila dilihat rata – rata rasio efektivitas keuangan Pemerintah Daerah di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Bali dalam kurun waktu 2014 – 2018, terlihat bahwa seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali memiliki nilai rasio di atas 100 (

Gambar 8). Kabupaten Klungkung tercatat memiliki nilai rata-rata rasio tertinggi selama kurun waktu 2014 – 2018 yaitu sebesar 126,37 persen. Sementara kabupaten/kota dengan rasio terendah tercatat di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 107,65 persen. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali lagi potensi riil daerahnya yang pada akhirnya mampu meningkatkan nilai PAD sehingga dapat menjadi daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi.

Gambar 8. Rata - Rata Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen)



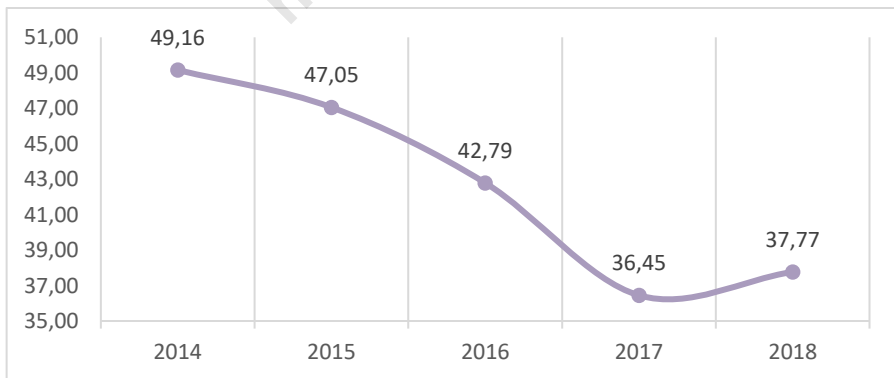


### 3.3 Belanja Daerah

Desentralisasi fiskal yang berlaku sampai saat ini memungkinkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendapatan daerah ke dalam belanja daerah sesuai dengan program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja daerah, di samping memiliki hubungan dengan kualitas pelayanan publik di daerah bersangkutan juga merupakan stimulus bagi pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut. Struktur belanja suatu daerah dapat memperlihatkan program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan data realisasi APBD tahun 2014 – 2018 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Bali, belanja daerah masih tercatat cukup didominasi oleh belanja pegawai. Pada tahun 2014, presentase belanja pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali mencapai 49,16 persen. Namun seiring dengan waktu, rasio belanja pegawai tercatat mengalami penurunan (Gambar 9).

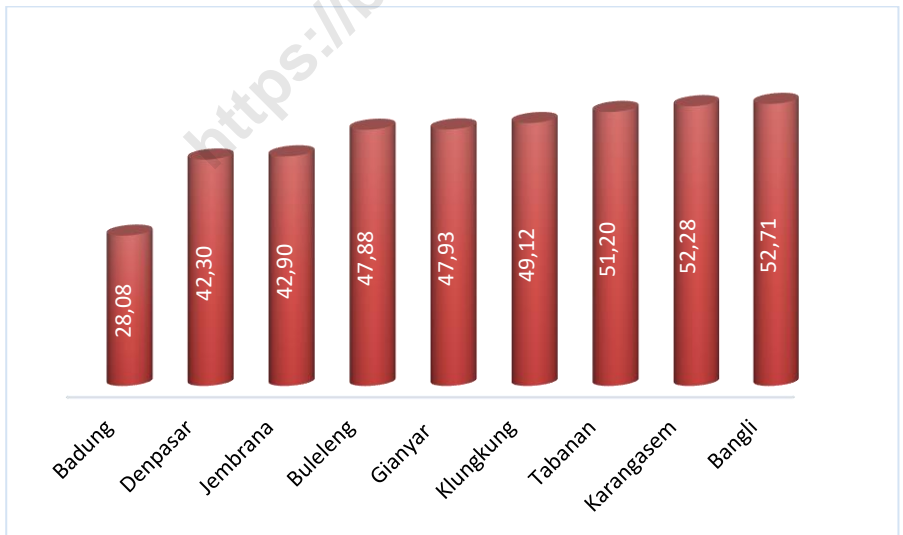
*Gambar 9. Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen)*





Dalam rentang waktu 2014 – 2018, dari delapan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bali, kini hanya menyisakan Kabupaten Bangli, Karangasem dan Tabanan yang tercatat memiliki rata-rata belanja pegawai di atas 50 persen. Secara rata – rata, rasio belanja pegawai terhadap total belanja tertinggi dalam periode 2014 – 2018 tercatat di Kabupaten Bangli yaitu sebesar 52,71 persen, disusul oleh Kabupaten Karangasem dan Tabanan masing-masing sebesar 52,28 persen dan 51,20 persen. Sementara itu, kabupaten lainnya sudah cukup mampu untuk menekan belanja pegawai di bawah 50 persen. Bahkan, Kabupaten Badung mampu untuk menekan belanja pegawai hingga mencapai rata-rata 28,08 persen per tahun dalam rentang waktu 2014-2018.

Gambar 10. Rata - Rata Rasio Belanja Pegawai Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen)



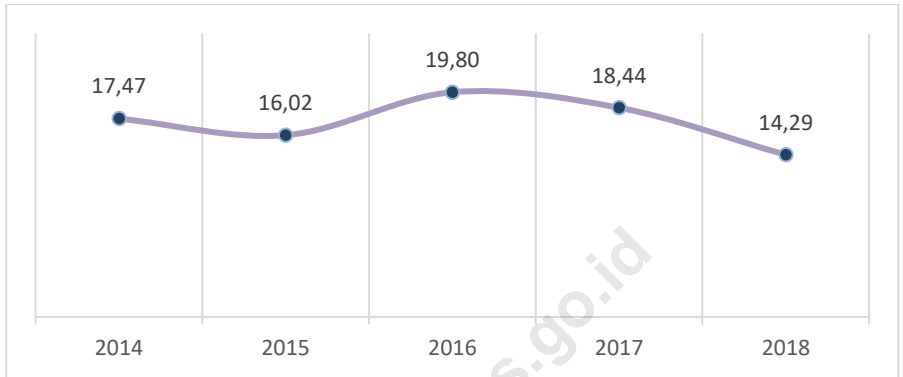


Di samping belanja pegawai, pemerintah juga melakukan belanja modal. Belanja modal pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam memicu pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Belanja modal bersifat produktif dan bersentuhan langsung dengan kepentingan publik sehingga diharapkan mampu menstimulus perekonomian di daerah bersangkutan. Belanja modal kiranya merupakan investasi pemerintah daerah yang diharapkan memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat di daerah tersebut. Salah satu bentuk dari belanja modal oleh pemerintah daerah, yaitu pembangunan infrastruktur, diharapkan akan mendorong dan meningkatkan iklim investasi di daerah bersangkutan, sehingga kegiatan ekonomi di daerah tersebut akan dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Rasio antara belanja modal terhadap total belanja daerah menunjukkan proporsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal. Semakin tinggi nilai rasionya maka diharapkan semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Selama periode 2014 – 2018 rasio belanja modal terhadap total belanja pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Bali menunjukkan trend kenaikan (Gambar 11). Namun demikian, rasio belanja modal terhadap total belanja selama 2014 – 2018 tercatat masih berada dibawah 20 persen.



Gambar 11. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen)



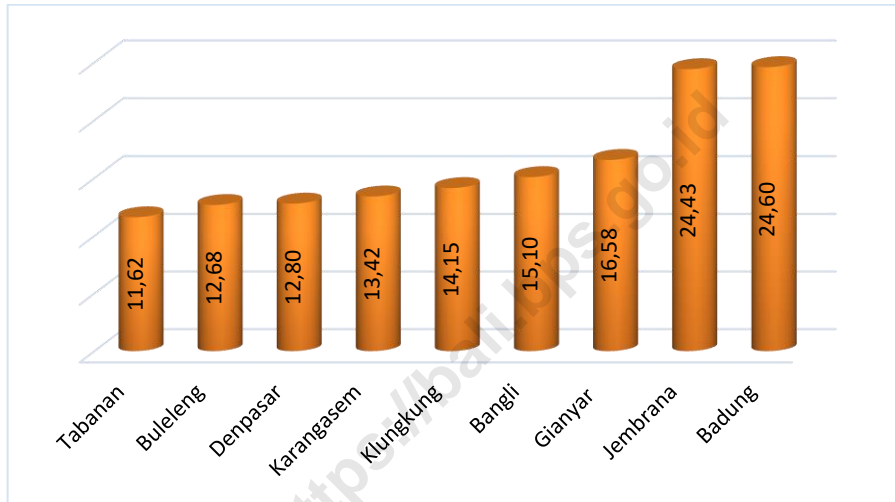
Rata – rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerah pada masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali tahun 2014 – 2018 dapat dilihat pada Gambar 12. Kabupaten Badung memiliki nilai rata-rata rasio belanja modal terhadap total belanja daerah tertinggi yaitu mencapai 27,04 persen. Tingginya pendapatan daerah di Kabupaten Badung memungkinkan Pemerintah Daerah mampu mengalokasikan anggarannya untuk belanja modal lebih besar. Hal ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Badung yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Bali selama kurun waktu 2014 – 2018. Berada pada posisi kedua, Kabupaten Jembrana mampu merealisasikan belanja modal dengan rata-rata 24,43 persen per tahun selama kurun waktu 2014 – 2018 meskipun menerima pendapatan yang paling rendah. Sebaliknya, Kabupaten Tabanan tercatat memiliki rata-rata rasio belanja per tahun yang paling rendah dalam kurun waktu 2014 – 2018, yaitu sebesar 11,62 persen. Sebagai catatan,





Kabupaten Tabanan merupakan kabupaten dengan penerimaan pendapatan terbesar kelima pada tahun 2018.

*Gambar 12. Rata - Rata Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Bali, 2014 – 2018 (persen)*





## LAMPIRAN TABEL

<https://bali.bps.go.id>







Table 1. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>766.305.431</b>	<b>836.696.489</b>	<b>1.055.603.785</b>	<b>1.096.717.726</b>	<b>1.114.793.253</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	65.680.235	72.832.071	88.244.045	119.758.102	128.271.932
1.1 Hasil Pajak Daerah	20.406.000	24.286.000	31.646.000	40.469.000	43.982.000
1.2 Hasil Retribusi Daerah	9.324.885	9.575.682	9.658.801	12.963.203	16.023.015
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.986.800	5.937.000	4.028.019	6.192.679	6.192.679
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	31.962.550	33.033.389	42.911.225	60.133.220	62.074.231
2 DANA PERIMBANGAN	550.401.204	29.732.457	716.423.706	754.947.556	707.552.634
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.029.070	20.442.465	20.748.312	23.086.646	22.162.154
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	484.825.804	486.895.030	562.525.134	562.525.134	552.643.376
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	43.546.330	63.039.590	133.150.260	169.335.776	132.747.104
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	150.223.992	193.487.333	250.936.034	222.012.068	278.968.688
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	30.242.800
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	77.364.265	105.791.275	131.887.498	99.204.282	100.823.541
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70.517.727	81.759.988	89.875.057	50.084.685	37.250.000
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.342.000	825.000	1.310.000	36.247.537	70.987.437
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	39.664.910
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	5.111.070	27.863.479	36.475.565	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>798.331.840</b>	<b>875.100.013</b>	<b>1.094.006.785</b>	<b>1.139.911.622</b>	<b>1.164.958.950</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	468.885.497	535.450.413	607.467.723	575.436.680	552.696.350
1.1 Belanja Pegawai	399.928.196	433.300.140	491.987.486	443.112.985	417.989.209
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	16.483.654	40.468.654	13.621.044	14.210.390	10.853.148
1.5 Belanja Bantuan Sosial	3.450.000	700.000	2.880.698	2.880.698	2.880.698
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.476.313	10.826.414	15.082.796	15.957.864	16.739.632
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	40.147.334	49.755.205	83.495.699	98.874.743	103.833.663
1.8 Belanja Tidak Terduga	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2 BELANJA LANGSUNG	329.446.343	339.649.600	486.539.062	564.474.942	612.262.600
2.1 Belanja Pegawai	28.276.605	33.332.647	42.042.592	48.974.275	52.892.603
2.2 Belanja Barang dan Jasa	154.026.486	156.078.816	192.015.343	236.306.765	292.622.484
2.3 Belanja Modal	147.143.252	150.238.137	252.481.128	279.193.902	266.747.513
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>32.026.409</b>	<b>4.568.122</b>	<b>38.403.000</b>	<b>43.193.895</b>	<b>50.165.696</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.494.848	48.362.528	48.385.706	53.176.602	65.811.369
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	36.231.954	43.099.634	42.321.143	47.112.039	60.411.369
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	62.894	0	664.563	664.563	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	62.894	0	0	0
1.8 Lainnya	5.200.000	5.200.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.468.439	9.959.004	9.982.706	9.982.706	15.645.672
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.268.439	4.759.004	4.582.706	4.582.706	10.245.672
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	5.200.000	5.200.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Table 2. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.260.942.535</b>	<b>1.405.197.386</b>	<b>1.826.470.474</b>	<b>1.847.829.532</b>	<b>1.891.138.654</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	212.931.601	243.793.958	270.777.557	327.462.528	409.183.800
1.1 Hasil Pajak Daerah	63.408.398	84.249.480	96.019.397	96.019.397	100.639.828
1.2 Hasil Retribusi Daerah	37.841.187	41.458.781	43.362.260	21.833.196	21.952.088
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.046.089	8.046.089	7.322.114	7.322.114	8.995.685
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	103.635.927	110.039.608	124.073.786	202.287.821	277.596.199
2 DANA PERIMBANGAN	798.650.500	107.177.945	1.184.284.312	1.135.165.882	1.077.346.592
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.514.480	23.038.891	24.580.187	27.130.191	27.630.309
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	719.621.530	722.004.642	826.283.780	826.283.780	811.768.631
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	58.514.490	59.386.100	333.420.345	281.751.911	237.947.652
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	249.360.434	356.973.795	371.408.605	385.201.122	404.608.262
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	97.676.154	61.213.907	2.800.000
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	96.342.065	132.459.065	162.078.638	158.426.761	122.188.535
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	146.900.369	224.111.730	88.183.813	113.917.874	153.310.276
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.118.000	403.000	23.470.000	51.642.580	126.309.451
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.287.757.355</b>	<b>1.429.917.386</b>	<b>1.870.990.474</b>	<b>2.103.349.532</b>	<b>2.126.658.654</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	888.661.528	1.045.313.438	1.233.031.906	1.127.348.308	1.157.608.398
1.1 Belanja Pegawai	769.764.376	878.463.853	1.007.000.725	847.890.938	843.013.938
1.2 Belanja Bunga	100.000	100.000	100.000	2.200.000	6.200.000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	32.355.000	41.001.813	6.684.700	38.387.000	58.902.400
1.5 Belanja Bantuan Sosial	6.000.000	9.000.000	3.300.000	3.300.000	3.700.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.689.000	8.668.700	13.938.166	14.417.336	14.417.336
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	71.117.960	107.077.858	201.021.515	220.771.400	228.288.130
1.8 Belanja Tidak Terduga	2.635.192	1.001.214	986.800	381.634	3.086.594
2 BELANJA LANGSUNG	399.095.827	384.603.948	637.958.568	976.001.224	969.050.256
2.1 Belanja Pegawai	14.970.987	22.661.449	33.430.192	30.364.133	23.378.786
2.2 Belanja Barang dan Jasa	260.978.974	282.243.569	391.631.744	429.869.090	487.884.488
2.3 Belanja Modal	123.145.866	79.698.930	212.896.632	515.768.001	457.786.982
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>26.814.820</b>	<b>65.235.151</b>	<b>44.520.000</b>	<b>255.520.000</b>	<b>235.520.000</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	32.094.820	40.000.000	55.000.000	266.000.000	236.000.000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	32.094.820	40.000.000	55.000.000	65.000.000	35.000.000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	201.000.000	201.000.000
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	5.280.000	15.280.000	10.480.000	10.480.000	480.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.200.000	14.400.000	10.200.000	10.400.000	400.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	80.000	880.000	80.000	80.000	80.000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	200.000	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 3. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.804.744.832</b>	<b>3.251.270.645</b>	<b>3.833.480.597</b>	<b>4.660.821.496</b>	<b>6.567.483.604</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.197.959.213	2.581.898.769	2.938.005.742	3.823.175.373	5.700.510.790
1.1 Hasil Pajak Daerah	1.986.068.719	2.302.810.000	2.562.460.318	3.308.382.257	4.989.883.606
1.2 Hasil Retribusi Daerah	75.687.001	75.244.749	104.699.674	101.132.656	151.097.842
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	77.554.931	111.812.395	143.726.455	237.148.583	245.533.717
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	58.648.562	92.031.625	127.119.295	176.511.877	313.995.625
2 DANA PERIMBANGAN	356.523.053	55.276.625	655.497.759	628.006.623	572.651.223
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	31.156.198	62.789.526	84.552.733	86.179.375	88.963.842
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	324.815.695	286.763.106	336.243.365	366.684.189	330.336.650
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	551.160	0	234.701.661	175.143.059	153.350.731
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	250.262.566	319.819.244	239.977.096	209.639.499	294.321.591
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	112.889.003	164.056.474	168.881.669	161.618.880	164.302.408
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	113.491.184	155.557.770	70.890.427	47.815.619	123.689.183
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	571.000	205.000	205.000	205.000	6.330.000
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.311.379	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>3.269.667.130</b>	<b>3.527.203.220</b>	<b>4.060.564.778</b>	<b>5.451.343.322</b>	<b>7.244.394.036</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.632.668.191	1.901.565.200	2.157.154.322	2.630.541.745	3.630.743.721
1.1 Belanja Pegawai	1.048.987.236	1.117.317.956	1.216.401.160	1.310.756.526	1.505.338.879
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	3.870.000	5.420.000	4.550.000	9.340.792	9.527.608
1.4 Belanja Hibah	76.624.649	183.489.696	224.855.879	421.897.203	714.093.052
1.5 Belanja Bantuan Sosial	34.150.000	34.150.000	39.450.000	70.775.000	199.716.870
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	241.519.389	286.013.710	338.835.264	423.163.490	628.516.450
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	224.516.917	272.173.838	330.062.018	386.308.734	563.550.861
1.8 Belanja Tidak Terduga	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8.300.000	10.000.000
2 BELANJA LANGSUNG	1.636.998.939	1.625.638.020	1.903.410.456	2.820.801.577	3.613.650.315
2.1 Belanja Pegawai	67.333.155	66.383.972	57.957.111	85.578.001	117.256.985
2.2 Belanja Barang dan Jasa	571.809.035	569.848.140	691.839.157	1.394.196.467	1.892.631.702
2.3 Belanja Modal	997.856.749	989.405.908	1.153.614.187	1.341.027.109	1.603.761.628
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>464.922.298</b>	<b>411.341</b>	<b>328.747.214</b>	<b>790.521.826</b>	<b>676.910.432</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	464.922.298	275.932.575	498.550.684	790.521.826	676.910.432
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	464.922.298	275.932.575	498.550.684	790.521.826	676.910.432
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	169.803.470	0	0
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	169.803.470	0	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.663.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Table 4. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.187.870.082</b>	<b>1.339.991.864</b>	<b>1.623.511.105</b>	<b>1.754.198.696</b>	<b>1.926.241.277</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	312.160.449	370.679.368	448.142.329	610.218.628	695.786.111
1.1 Hasil Pajak Daerah	211.596.789	248.254.234	310.977.532	457.949.909	533.324.909
1.2 Hasil Retribusi Daerah	30.560.391	31.668.994	35.691.785	38.825.584	50.133.084
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.616.161	9.902.111	8.717.260	6.122.557	8.233.348
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	63.387.108	80.854.029	92.755.752	107.320.578	104.094.770
2 DANA PERIMBANGAN	684.180.739	73.111.095	965.786.291	954.905.321	940.972.138
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	12.623.291	24.729.422	26.587.184	30.820.114	31.070.230
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	626.674.608	641.915.439	705.975.450	705.975.450	693.573.732
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	44.882.840	0	233.223.657	218.109.757	216.328.176
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	191.528.894	302.667.635	209.582.485	189.074.747	289.483.029
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	53.527.400
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	73.596.586	107.660.232	126.758.477	119.271.231	121.209.397
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	110.908.308	188.602.403	82.239.008	63.253.828	102.471.543
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.024.000	6.405.000	585.000	6.549.688	12.274.688
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.285.370.082</b>	<b>1.445.120.459</b>	<b>1.916.464.409</b>	<b>2.088.917.280</b>	<b>2.112.711.371</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	816.325.763	993.556.610	1.096.395.236	1.101.834.394	1.219.848.473
1.1 Belanja Pegawai	699.814.264	838.350.786	832.679.167	791.693.231	829.135.935
1.2 Belanja Bunga	0	0	5.250.000	4.590.000	10.650.000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	23.881.650	22.514.710	44.029.118	63.348.721	109.977.708
1.5 Belanja Bantuan Sosial	9.989.130	5.173.630	5.185.800	2.185.800	12.984.300
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	31.492.420	32.725.924	42.097.124	57.318.207	71.866.878
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	50.648.299	94.291.560	166.654.028	182.198.435	184.733.652
1.8 Belanja Tidak Terduga	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2 BELANJA LANGSUNG	469.044.319	451.563.849	820.069.174	987.082.886	892.862.898
2.1 Belanja Pegawai	36.415.667	44.133.377	51.772.799	57.139.506	41.715.569
2.2 Belanja Barang dan Jasa	231.697.502	216.148.494	307.443.712	411.325.515	496.290.602
2.3 Belanja Modal	200.931.150	191.281.978	460.852.662	518.617.864	354.856.727
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>97.500.000</b>	<b>83.915.981</b>	<b>292.953.304</b>	<b>334.718.584</b>	<b>186.470.093</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	105.000.000	112.628.595	308.003.304	356.064.010	231.195.093
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	105.000.000	112.628.595	158.003.304	260.064.010	200.972.426
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	150.000.000	96.000.000	30.222.667
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	7.500.000	7.500.000	15.050.000	21.345.426	44.725.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	15.050.000	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.500.000	7.500.000	0	0	16.600.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	17.970.426	28.125.000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	3.375.000	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Table 5. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>667.389.254</b>	<b>838.871.569</b>	<b>1.067.796.991</b>	<b>1.032.084.018</b>	<b>1.094.682.989</b>
PENDAPATAN ASLI DAERAH	69.749.456	89.563.450	121.979.255	124.016.073	152.478.228
1.1 Hasil Pajak Daerah	12.946.461	17.038.900	35.943.923	34.078.743	44.515.847
1.2 Hasil Retribusi Daerah	19.876.663	19.609.138	21.841.439	26.594.177	25.751.986
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.619.793	8.101.503	7.773.398	8.170.275	8.170.595
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	28.306.539	44.813.909	56.420.495	55.172.878	74.039.800
2 DANA PERIMBANGAN	531.480.691	39.436.391	714.620.572	673.758.014	680.647.356
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	14.785.505	18.650.569	20.406.590	22.492.122	21.784.414
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	474.427.796	484.541.151	539.855.201	539.855.201	530.371.681
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	42.267.390	54.045.790	154.358.781	111.410.691	128.491.261
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	66.159.107	192.070.609	231.197.165	234.309.931	261.557.405
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	33.633.600	4.800.000	27.736.320
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.483.707	78.500.342	130.084.428	113.391.928	86.364.064
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0	98.167.267	34.259.137	95.883.195	78.016.021
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.675.400	15.403.000	33.220.000	20.234.808	69.441.000
3.6 Dana Desa	-	-	-	-	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>709.378.305</b>	<b>912.707.523</b>	<b>1.216.958.321</b>	<b>1.146.303.633</b>	<b>1.218.103.633</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	455.215.480	597.789.006	620.162.388	634.019.416	631.536.091
1.1 Belanja Pegawai	381.191.187	490.736.393	503.390.607	481.812.398	475.157.151
1.2 Belanja Bunga	0	0	2.000.000	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	41.666.374	37.993.734	3.432.200	38.123.494	42.082.279
1.5 Belanja Bantuan Sosial	2.081.977	1.662.500	2.698.000	0	0
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.519.352	7.447.241	7.246.883	6.067.292	7.028.000
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	27.456.590	59.649.138	96.463.939	104.304.429	107.268.661
1.8 Belanja Tidak Terduga	300.000	300.000	6.930.759	1.711.803	0
2 BELANJA LANGSUNG	254.162.825	314.918.517	596.795.933	512.284.217	586.567.542
2.1 Belanja Pegawai	11.455.689	14.046.907	23.911.163	20.031.093	20.235.622
2.2 Belanja Barang dan Jasa	154.470.454	175.184.539	325.727.702	297.666.297	394.557.980
2.3 Belanja Modal	88.236.682	125.687.071	247.157.069	194.586.827	171.773.940
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>42.682.754</b>	<b>13.008.529</b>	<b>149.161.330</b>	<b>114.219.615</b>	<b>123.420.644</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	45.432.754	76.210.954	155.886.330	122.244.615	131.420.644
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	44.682.754	75.835.954	154.861.330	102.244.615	131.420.644
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	20.000.000	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	750.000	375.000	1.025.000	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.750.000	2.375.000	6.725.000	8.025.000	8.000.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.750.000	2.375.000	6.725.000	8.025.000	8.000.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>693.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Table 6. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>721.635.214</b>	<b>826.028.973</b>	<b>1.030.680.245</b>	<b>1.066.943.918</b>	<b>1.118.895.723</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.200.000	82.000.000	92.000.000	117.500.000	120.500.000
1.1 Hasil Pajak Daerah	10.161.312	10.241.554	12.333.000	14.982.887	16.268.930
1.2 Hasil Retribusi Daerah	14.045.488	22.252.888	22.054.154	28.284.993	26.332.175
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.400.200	3.318.478	3.115.143	5.110.553	5.931.700
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	26.593.000	46.187.080	54.497.703	69.121.567	71.967.195
2 DANA PERIMBANGAN	548.602.929	44.715.580	772.968.948	763.517.158	734.566.997
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.026.004	19.079.052	19.142.433	21.192.135	21.005.964
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	486.381.005	499.734.801	568.278.934	568.278.934	559.867.699
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	43.195.920	55.096.890	185.547.581	174.046.089	153.693.334
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	117.832.285	170.118.230	165.711.297	185.926.760	263.828.726
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	60.133.119	80.308.152	117.900.992	116.617.667	87.183.185
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	55.975.166	86.367.248	43.090.305	55.783.753	104.826.236
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.724.000	3.442.830	4.720.000	13.525.340	71.819.305
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>784.773.769</b>	<b>930.895.765</b>	<b>1.135.996.245</b>	<b>1.137.341.371</b>	<b>1.304.088.934</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	560.902.120	662.045.111	694.104.942	628.256.778	786.496.573
1.1 Belanja Pegawai	445.509.408	531.937.565	576.004.084	446.464.222	524.139.212
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	35.076.399	41.927.000	685.000	9.676.835	10.856.819
1.5 Belanja Bantuan Sosial	4.473.000	1.300.000	0	0	0
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.420.830	3.300.444	3.439.215	4.326.789	4.260.111
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	71.922.483	82.680.102	112.976.643	166.788.932	246.240.431
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.500.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2 BELANJA LANGSUNG	223.871.649	268.850.654	441.891.303	509.084.593	517.592.361
2.1 Belanja Pegawai	21.072.750	48.455.058	61.418.633	56.811.196	51.213.300
2.2 Belanja Barang dan Jasa	133.919.731	124.704.281	153.360.232	170.051.948	200.479.268
2.3 Belanja Modal	68.879.168	95.691.315	227.112.438	282.221.449	265.899.793
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>63.138.555</b>	<b>2.741.893</b>	<b>105.316.000</b>	<b>70.397.453</b>	<b>185.193.211</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	63.638.555	104.866.792	110.000.000	70.397.453	185.193.211
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	63.638.555	104.866.792	110.000.000	70.397.453	185.193.211
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	500.000	0	4.684.000	0	0
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000	0	4.684.000	0	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 7. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.116.371.215</b>	<b>1.226.081.077</b>	<b>1.766.956.768</b>	<b>1.553.327.398</b>	<b>1.561.878.043</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	160.008.363	205.273.392	233.609.397	233.653.020	234.000.000
1.1 Hasil Pajak Daerah	99.758.423	125.839.116	134.299.663	138.301.371	116.501.484
1.2 Hasil Retribusi Daerah	10.191.800	10.236.014	12.098.415	11.236.990	18.362.770
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.418.140	14.633.230	12.333.527	12.862.601	11.741.522
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	34.640.000	54.565.032	74.877.792	71.252.058	87.394.224
2 DANA PERIMBANGAN	701.929.283	50.855.032	1.258.489.522	974.180.548	953.288.305
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	26.661.842	23.024.006	23.084.489	25.557.964	23.994.833
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	614.793.461	633.241.287	732.963.859	759.506.567	729.378.991
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	60.473.980	69.845.030	502.441.174	189.116.017	199.914.481
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	254.433.569	294.697.362	274.857.849	345.493.830	374.589.738
3.1 Pendapatan Hibah	420.000	0	64.381.193	56.872.100	56.872.100
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	63.995.987	91.401.629	109.637.535	112.994.623	114.854.629
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	116.152.134	166.686.741	49.301.984	71.182.742	99.626.212
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	73.865.448	36.608.992	51.537.137	104.444.365	103.236.797
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.155.747.491</b>	<b>1.269.495.869</b>	<b>1.811.460.388</b>	<b>1.573.795.980</b>	<b>1.598.133.043</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	765.199.902	895.592.830	1.194.242.956	891.028.314	936.156.926
1.1 Belanja Pegawai	658.216.931	721.799.958	1.011.539.063	698.490.517	713.450.212
1.2 Belanja Bunga	8.165.000	8.165.000	5.000.000	1.500.000	100.000
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	30.436.007	42.556.326	2.980.500	12.063.000	7.143.000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	3.000.000	3.242.000	955.000	1.810.000	24.650.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.071.742	13.607.513	14.639.808	14.953.836	17.532.353
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	47.310.222	103.222.033	157.128.585	160.210.961	165.281.360
1.8 Belanja Tidak Terduga	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
2 BELANJA LANGSUNG	390.547.589	373.903.039	617.217.432	682.767.666	661.976.118
2.1 Belanja Pegawai	19.576.789	20.644.145	29.605.535	39.709.286	37.757.796
2.2 Belanja Barang dan Jasa	211.036.689	236.147.176	344.268.642	408.098.356	437.427.670
2.3 Belanja Modal	159.934.111	117.111.718	243.343.256	234.960.024	186.790.652
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>39.376.276</b>	<b>16.680.763</b>	<b>44.503.620</b>	<b>20.468.582</b>	<b>36.255.000</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	66.389.276	72.795.932	73.003.620	45.068.582	40.000.000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	66.389.276	72.795.932	73.003.620	45.068.582	40.000.000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	27.013.000	29.381.140	28.500.000	24.600.000	3.745.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000	4.368.140	4.500.000	3.600.000	3.600.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	25.013.000	25.013.000	24.000.000	21.000.000	145.000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Table 8. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.468.256.803</b>	<b>1.668.718.324</b>	<b>2.082.621.121</b>	<b>2.157.390.809</b>	<b>2.124.617.362</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	176.133.800	221.903.000	273.607.818	351.807.706	371.366.874
1.1 Hasil Pajak Daerah	68.972.337	85.782.281	115.956.038	143.297.958	151.462.856
1.2 Hasil Retribusi Daerah	13.106.070	13.018.096	18.359.171	20.486.873	21.511.113
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.730.798	11.961.901	13.329.765	15.029.632	15.750.000
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	81.324.595	111.140.722	125.962.844	172.993.243	182.642.905
2 DANA PERIMBANGAN	957.813.099	99.931.800	1.364.898.869	1.338.584.136	1.270.128.889
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.382.641	33.629.377	32.090.906	35.522.652	33.962.198
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	854.532.248	868.511.959	982.698.080	982.698.080	965.435.235
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	64.898.210	74.876.950	350.109.883	320.363.404	270.731.456
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	334.309.904	469.797.038	444.114.434	466.998.967	483.121.599
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	0	0	88.801.600
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	127.877.285	172.687.624	198.737.341	199.809.021	148.675.384
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	186.575.619	281.331.752	210.322.093	249.994.837	141.632.607
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	19.857.000	15.777.662	35.055.000	17.195.109	104.012.008
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.605.091.803</b>	<b>1.785.202.066</b>	<b>2.156.911.480</b>	<b>2.145.790.809</b>	<b>2.159.920.047</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	986.233.738	1.176.323.664	1.281.299.177	1.176.666.558	1.164.553.107
1.1 Belanja Pegawai	867.579.713	982.146.961	996.202.896	818.897.684	822.928.380
1.2 Belanja Bunga	60.000	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	28.000.000	35.329.407	39.889.310	93.137.600	71.129.275
1.5 Belanja Bantuan Sosial	4.515.000	4.765.000	150.000	811.000	28.454.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.207.841	9.880.038	13.431.521	16.400.000	17.297.397
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	71.844.402	138.942.445	230.027.309	245.169.716	220.214.771
1.8 Belanja Tidak Terduga	6.026.782	5.259.813	1.598.141	2.250.558	4.529.284
2 BELANJA LANGSUNG	618.858.065	608.878.402	875.612.303	969.124.251	995.366.940
2.1 Belanja Pegawai	30.395.700	31.674.659	49.241.794	58.257.547	61.176.978
2.2 Belanja Barang dan Jasa	327.145.718	343.487.160	520.050.860	630.357.395	691.503.323
2.3 Belanja Modal	261.316.647	233.716.583	306.319.650	280.509.309	242.686.639
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>136.835.000</b>	<b>17.209.024</b>	<b>74.290.359</b>	<b>-11.600.000</b>	<b>35.302.685</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	145.000.000	127.133.742	84.590.359	0	57.302.685
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	145.000.000	127.133.742	84.590.359	0	57.302.685
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	8.165.000	10.650.000	10.300.000	11.600.000	22.000.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	10.300.000	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.865.000	10.650.000	0	11.600.000	22.000.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	300.000	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 9. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.467.521.163</b>	<b>1.725.426.452</b>	<b>2.014.147.069</b>	<b>1.917.638.288</b>	<b>2.040.573.867</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	610.266.592	681.259.855	715.452.848	805.299.902	808.925.880
1.1 Hasil Pajak Daerah	468.840.592	523.978.712	533.177.648	577.409.173	590.500.000
1.2 Hasil Retribusi Daerah	44.804.344	44.029.560	46.231.038	45.463.880	35.035.380
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.815.606	24.531.583	25.758.162	38.614.201	48.460.500
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	71.806.050	88.720.000	110.286.000	143.812.649	134.930.000
2 DANA PERIMBANGAN	715.256.133	76.600.000	1.087.392.416	913.883.197	908.579.249
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	74.651.447	71.101.582	85.655.993	96.679.366	102.975.626
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	615.961.906	625.978.507	661.794.756	661.794.765	650.169.150
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	24.642.780	5.226.190	339.941.667	155.409.066	155.434.473
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	141.998.438	341.860.318	211.301.805	198.455.189	323.068.738
3.1 Pendapatan Hibah	1.636.248	0	0	0	99.465.800
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	106.343.905	158.753.502	184.188.800	160.963.373	163.597.963
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	22.763.285	182.856.816	26.863.005	7.500.000	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	11.255.000	250.000	250.000	29.991.816	5.350.000
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	27.404.975
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	0	0	27.250.000
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.552.521.163</b>	<b>1.760.606.869</b>	<b>2.126.032.569</b>	<b>2.055.069.223</b>	<b>2.200.039.867</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	750.941.457	1.016.504.141	1.241.083.854	1.045.037.374	1.134.456.373
1.1 Belanja Pegawai	626.718.909	830.056.405	991.172.729	782.708.053	835.074.049
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	33.616.568	72.361.689	34.097.575	61.824.414	99.652.000
1.5 Belanja Bantuan Sosial	325.000	2.672.913	2.672.913	3.498.000	4.498.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	21.544.000	29.044.000	57.940.869	62.042.817	62.553.538
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	66.846.980	79.369.134	152.199.768	131.964.090	129.678.786
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.890.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2 BELANJA LANGSUNG	801.579.706	744.102.728	884.948.715	1.010.031.849	1.065.583.494
2.1 Belanja Pegawai	18.637.751	17.674.915	21.132.491	25.710.394	20.891.997
2.2 Belanja Barang dan Jasa	511.682.959	516.563.756	577.298.327	612.276.065	755.258.758
2.3 Belanja Modal	271.258.996	209.864.057	286.517.897	372.045.390	289.432.739
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>85.000.000</b>	<b>11.861.634</b>	<b>111.885.500</b>	<b>137.430.935</b>	<b>159.466.000</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	100.000.000	100.000.000	122.385.500	159.913.672	164.000.000
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.000.000	100.000.000	122.385.500	100.000.000	164.000.000
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	59.913.672	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	15.000.000	64.819.583	10.500.000	22.482.737	4.534.000
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	15.000.000	64.819.583	10.500.000	10.500.000	4.534.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	11.982.737	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 10. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jembrana Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>823.352.410</b>	<b>903.622.270</b>	<b>1.090.625.089</b>	<b>1.186.843.211</b>	<b>1.096.498.631</b>
1 <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>89.349.645</b>	<b>98.032.646</b>	<b>114.533.487</b>	<b>121.342.475</b>	<b>126.477.267</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	30.111.096	32.861.322	33.964.149	35.515.927	34.940.515
1.2 Hasil Retribusi Daerah	8.836.895	8.925.326	10.241.922	9.191.266	9.669.791
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.940.559	4.912.892	6.183.844	6.189.438	6.078.926
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.461.095	51.333.106	64.143.572	70.445.844	75.788.035
2 <b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>546.799.187</b>	<b>577.461.799</b>	<b>707.078.035</b>	<b>727.758.128</b>	<b>693.195.696</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.427.053	15.688.309	20.162.001	20.189.436	19.145.766
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	484.825.804	486.895.030	562.525.134	552.643.376	552.328.680
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	43.546.330	74.878.460	124.390.900	154.925.317	121.721.251
3 <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>187.203.579</b>	<b>228.127.824</b>	<b>269.013.568</b>	<b>337.742.608</b>	<b>276.825.668</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	58.787.556	30.107.587	29.669.024
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	114.153.616	131.798.589	101.663.393	99.899.938	109.752.839
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	70.899.963	83.094.188	53.112.041	50.084.685	37.250.000
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	2.150.000	825.000	27.587.098	117.505.880	60.762.081
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	39.391.724
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	12.410.047	27.863.479	40.144.518	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>786.285.299</b>	<b>885.633.184</b>	<b>1.128.489.214</b>	<b>1.038.782.384</b>	<b>1.217.106.320</b>
1 <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>441.901.508</b>	<b>506.733.928</b>	<b>520.560.153</b>	<b>495.845.593</b>	<b>527.066.694</b>
1.1 Belanja Pegawai	376.791.591	397.650.714	410.511.394	353.743.177	373.431.056
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	16.157.500	39.120.670	10.823.752	13.498.910	15.558.271
1.5 Belanja Bantuan Sosial	2.984.519	225.333	455.598	4.115.375	4.909.125
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.558.125	13.099.594	15.736.498	16.827.960	17.636.779
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	37.409.773	56.636.018	83.032.913	107.660.170	115.527.688
1.8 Belanja Tidak Terduga	0	1.599	0	0	3.776
2 <b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>344.383.791</b>	<b>378.899.256</b>	<b>607.929.061</b>	<b>542.936.791</b>	<b>690.039.626</b>
2.1 Belanja Pegawai	26.392.136	31.514.727	53.011.013	48.635.739	52.204.381
2.2 Belanja Barang dan Jasa	156.133.946	161.433.363	230.285.169	250.560.197	293.182.626
2.3 Belanja Modal	161.857.709	185.951.166	324.632.880	243.740.854	344.652.618
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>82.265.655</b>	<b>115.887.900</b>	<b>115.089.511</b>	<b>71.934.879</b>	<b>208.295.707</b>
1 <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>90.665.655</b>	<b>124.437.900</b>	<b>132.008.467</b>	<b>79.834.879</b>	<b>219.995.707</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	84.863.986	119.332.767	132.008.467	76.876.879	219.995.707
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	601.669	105.133	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	5.200.000	5.000.000	0	2.958.000	0
2 <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.550.000</b>	<b>16.918.956</b>	<b>7.900.000</b>	<b>11.700.000</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.200.000	3.550.000	16.918.956	5.000.000	10.000.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	5.200.000	5.000.000	0	2.900.000	1.700.000
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>119.332.767</b>	<b>133.876.986</b>	<b>77.225.386</b>	<b>219.995.707</b>	<b>87.688.018</b>



Tabel 11. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.367.078.412</b>	<b>1.615.933.308</b>	<b>1.794.601.450</b>	<b>1.871.864.103</b>	<b>1.862.277.204</b>
1 <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>273.426.482</b>	<b>300.799.020</b>	<b>318.083.799</b>	<b>426.635.751</b>	<b>363.370.469</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	95.414.689	105.792.993	105.186.643	128.176.142	97.930.045
1.2 Hasil Retribusi Daerah	42.557.737	47.030.646	22.397.630	20.466.249	29.213.425
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.197.219	7.322.114	8.741.999	10.385.423	9.673.604
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	128.256.837	140.653.267	181.757.527	267.607.937	226.553.395
2 <b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>799.770.748</b>	<b>815.846.445</b>	<b>1.102.265.093</b>	<b>1.096.289.816</b>	<b>1.063.464.922</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	21.634.728	17.441.963	23.775.525	23.944.695	23.104.621
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	719.621.530	722.004.642	826.283.780	811.768.631	811.768.631
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	58.514.490	76.399.840	252.205.788	260.576.490	228.591.670
3 <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>293.881.182</b>	<b>499.287.843</b>	<b>374.252.558</b>	<b>348.938.536</b>	<b>435.441.813</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	93.214.569	101.080.965	5.645.303	44.063.419
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	129.514.006	157.674.595	113.082.190	131.145.049	133.166.486
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	159.747.176	247.995.679	88.183.813	113.917.874	152.721.992
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.620.000	403.000	22.969.446	98.230.310	105.489.916
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	48.936.144	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.333.200.899</b>	<b>1.586.227.841</b>	<b>1.873.464.986</b>	<b>1.861.962.380</b>	<b>1.909.975.376</b>
1 <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>904.158.292</b>	<b>1.050.354.518</b>	<b>1.172.428.439</b>	<b>1.116.208.096</b>	<b>1.166.534.746</b>
1.1 Belanja Pegawai	765.788.560	824.144.117	910.740.328	804.449.867	826.488.843
1.2 Belanja Bunga	53.534	44.197	31.394	13.536	2.020.960
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	42.877.500	45.344.113	37.395.400	67.797.086	91.043.713
1.5 Belanja Bantuan Sosial	7.938.000	3.204.500	2.926.000	2.999.500	4.278.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.689.000	12.978.454	14.417.336	14.417.336	14.417.336
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	80.174.694	164.630.137	206.136.049	226.438.571	228.285.894
1.8 Belanja Tidak Terduga	636.914	0	781.932	92.200	0
2 <b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>429.042.607</b>	<b>535.882.323</b>	<b>701.036.547</b>	<b>745.754.284</b>	<b>743.440.630</b>
2.1 Belanja Pegawai	13.824.716	33.905.165	27.146.895	22.159.485	109.090.594
2.2 Belanja Barang dan Jasa	278.872.986	389.007.715	416.829.978	433.029.612	416.110.096
2.3 Belanja Modal	136.344.905	112.969.443	257.059.674	290.565.187	218.239.940
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>87.466.515</b>	<b>117.690.293</b>	<b>146.569.365</b>	<b>55.422.906</b>	<b>65.395.817</b>
1 <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>92.899.550</b>	<b>121.968.328</b>	<b>148.047.400</b>	<b>65.850.941</b>	<b>65.723.852</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	92.528.624	121.329.374	147.395.730	65.213.158	65.324.629
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	370.926	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	638.954	651.670	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	637.783	399.223
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
2 <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>5.433.035</b>	<b>4.278.035</b>	<b>1.478.035</b>	<b>10.428.035</b>	<b>328.035</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	200.000	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.355.000	4.000.000	1.200.000	10.350.000	250.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	78.035	78.035	78.035	78.035	78.035
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	200.000	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>121.344.102</b>	<b>147.395.760</b>	<b>67.705.829</b>	<b>65.324.629</b>	<b>17.697.645</b>



Tabel 12. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.459.986.016</b>	<b>3.735.129.565</b>	<b>4.328.245.676</b>	<b>4.939.386.134</b>	<b>5.420.009.298</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>2.722.625.563</b>	<b>3.001.464.263</b>	<b>3.563.589.483</b>	<b>4.172.457.396</b>	<b>4.555.716.407</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	2.339.332.865	2.598.718.130	2.968.152.918	3.490.156.150	3.872.911.783
1.2 Hasil Retribusi Daerah	116.502.661	96.040.159	118.514.066	128.717.148	135.908.890
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	125.339.003	142.995.660	186.013.183	255.932.876	238.041.274
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	141.451.034	163.710.314	290.909.316	297.651.222	308.854.461
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>381.713.596</b>	<b>332.251.562</b>	<b>543.323.025</b>	<b>555.889.277</b>	<b>558.028.882</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.346.741	44.947.526	78.823.886	73.843.812	80.192.486
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	324.815.695	286.763.106	336.243.365	330.336.650	330.336.650
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	551.160	540.930	128.255.774	151.708.815	147.499.746
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>355.646.857</b>	<b>401.413.740</b>	<b>221.333.168</b>	<b>211.039.461</b>	<b>306.264.009</b>
3.1 Pendapatan Hibah	70.344.473	75.091.364	0	1.779.222	0
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	130.253.478	162.799.634	150.237.741	56.696.422	176.381.419
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	131.532.528	163.317.741	70.890.427	47.815.619	123.552.590
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	205.000	205.000	205.000	104.748.198	6.330.000
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.311.379	0	0	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>3.276.164.110</b>	<b>3.446.634.315</b>	<b>4.162.119.988</b>	<b>5.413.936.423</b>	<b>5.799.584.400</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.654.384.787</b>	<b>1.909.366.328</b>	<b>2.100.194.081</b>	<b>2.758.358.887</b>	<b>3.224.366.105</b>
1.1 Belanja Pegawai	982.021.269	1.035.507.051	1.094.429.122	1.186.173.131	1.357.920.767
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	3.837.400	5.393.600	4.378.338	7.476.568	5.770.880
1.4 Belanja Hibah	93.604.910	144.802.581	186.856.128	500.440.836	794.612.019
1.5 Belanja Bantuan Sosial	33.549.093	26.839.800	43.116.500	100.802.395	223.693.798
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	272.387.605	332.221.197	385.408.982	493.114.327	505.025.847
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	268.781.366	364.602.099	385.529.239	458.163.692	328.671.644
1.8 Belanja Tidak Terduga	203.145	0	475.772	12.187.940	8.671.149
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>1.621.779.323</b>	<b>1.537.267.986</b>	<b>2.061.925.907</b>	<b>2.655.577.536</b>	<b>2.575.218.295</b>
2.1 Belanja Pegawai	63.427.200	59.742.497	52.697.107	106.950.527	107.521.240
2.2 Belanja Barang dan Jasa	609.282.785	554.753.161	814.112.678	1.307.515.345	1.560.931.093
2.3 Belanja Modal	949.069.337	922.772.328	1.195.116.122	1.241.111.665	906.765.962
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>739.884.087</b>	<b>625.326.073</b>	<b>910.007.075</b>	<b>1.075.636.186</b>	<b>600.981.412</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>893.884.087</b>	<b>925.326.073</b>	<b>914.810.545</b>	<b>1.076.416.778</b>	<b>600.981.412</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	888.147.920	923.705.992	913.860.040	1.076.132.762	600.948.966
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	455.618	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	5.736.167	1.164.463	0	284.016	31.667
1.8 Lainnya	0	0	950.505	0	780
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>154.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>4.803.470</b>	<b>780.592</b>	<b>0</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	154.000.000	300.000.000	4.803.470	0	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	780.592	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>923.705.992</b>	<b>913.821.324</b>	<b>1.076.132.762</b>	<b>601.085.896</b>	<b>221.406.311</b>



Tabel 13. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gianyar Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.400.913.781</b>	<b>1.527.797.536</b>	<b>1.682.778.978</b>	<b>1.808.814.501</b>	<b>2.002.646.874</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>424.472.546</b>	<b>457.321.018</b>	<b>529.864.618</b>	<b>662.753.475</b>	<b>770.204.849</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	276.603.966	307.668.563	372.927.608	484.010.689	578.938.948
1.2 Hasil Retribusi Daerah	35.472.015	40.055.120	40.756.608	39.281.032	49.427.670
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.685.085	7.530.611	8.248.444	7.709.528	7.875.922
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	102.711.480	102.066.724	107.931.958	131.752.226	133.962.309
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>694.464.178</b>	<b>673.568.860</b>	<b>905.918.780</b>	<b>916.514.053</b>	<b>928.953.908</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.906.730	18.983.901	27.323.005	26.054.640	27.454.452
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	626.674.608	641.915.439	705.975.450	693.573.732	693.573.732
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	44.882.840	12.669.520	172.620.325	196.885.681	207.925.724
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>281.977.057</b>	<b>396.907.658</b>	<b>246.995.580</b>	<b>229.546.974</b>	<b>303.488.117</b>
3.1 Pendapatan Hibah	1.254.000	71.207.425	53.599.580	41.474.200	56.216.160
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	102.717.775	121.995.559	110.404.608	119.285.958	132.021.258
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	177.774.328	198.962.709	82.239.008	63.253.828	102.471.543
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	205.000	4.741.965	560.823	5.532.988	12.779.156
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	25.954	0	191.292	0	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.354.851.666</b>	<b>1.504.436.669</b>	<b>1.786.411.745</b>	<b>1.922.948.830</b>	<b>2.046.852.685</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>862.790.093</b>	<b>936.408.399</b>	<b>1.074.627.473</b>	<b>1.067.478.185</b>	<b>1.249.937.001</b>
1.1 Belanja Pegawai	729.415.554	766.423.103	789.248.493	709.640.772	832.708.142
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	2.969.125	9.197.193
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	29.888.691	24.717.940	50.029.224	109.963.202	137.771.901
1.5 Belanja Bantuan Sosial	10.137.470	5.172.084	2.018.306	1.761.596	9.398.337
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	31.767.119	31.719.899	47.086.496	60.677.964	82.247.626
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	60.969.556	107.944.073	185.620.386	182.284.687	178.613.802
1.8 Belanja Tidak Terduga	611.702	431.300	624.567	180.839	0
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>492.061.573</b>	<b>568.028.270</b>	<b>711.784.273</b>	<b>855.470.645</b>	<b>796.915.684</b>
2.1 Belanja Pegawai	34.272.471	48.670.764	54.456.292	46.593.520	38.693.988
2.2 Belanja Barang dan Jasa	256.608.015	295.175.011	347.410.368	399.516.602	461.195.235
2.3 Belanja Modal	201.181.086	224.182.495	309.917.612	409.360.523	297.026.461
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>191.137.733</b>	<b>227.478.093</b>	<b>235.479.596</b>	<b>227.759.613</b>	<b>96.130.802</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>199.637.733</b>	<b>239.737.667</b>	<b>250.838.960</b>	<b>245.730.039</b>	<b>140.280.570</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	199.637.733	239.737.667	250.838.960	131.864.502	113.625.285
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	113.865.537	26.654.186
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	1.099
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>8.500.000</b>	<b>12.259.574</b>	<b>15.359.364</b>	<b>17.970.426</b>	<b>44.149.768</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	8.500.000	12.259.574	15.050.000	17.970.426	6.000.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	28.125.000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	309.364	0	10.024.768
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>273.199.846</b>	<b>250.838.960</b>	<b>131.846.829</b>	<b>113.625.285</b>	<b>51.924.991</b>



Tabel 14. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>827.028.807</b>	<b>907.139.632</b>	<b>1.062.218.238</b>	<b>1.098.938.730</b>	<b>1.100.138.936</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>98.837.766</b>	<b>120.035.996</b>	<b>134.142.054</b>	<b>153.210.776</b>	<b>186.974.284</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	19.654.037	34.668.113	43.744.803	53.457.710	60.606.210
1.2 Hasil Retribusi Daerah	22.441.798	21.776.641	21.874.454	22.978.426	22.707.456
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.093.536	7.164.793	7.778.148	8.008.286	7.863.919
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48.648.395	56.426.449	60.744.649	68.766.354	95.796.698
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>532.950.783</b>	<b>542.012.560</b>	<b>699.514.521</b>	<b>653.544.539</b>	<b>669.716.216</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.255.597	14.233.393	19.439.467	20.319.282	18.401.278
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	474.427.796	484.541.151	539.855.201	530.371.681	530.371.681
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	42.267.390	43.238.016	140.219.853	102.853.576	120.943.258
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>195.240.258</b>	<b>245.091.076</b>	<b>228.561.663</b>	<b>292.183.415</b>	<b>243.448.436</b>
3.1 Pendapatan Hibah	1.890.000	23.770.800	24.629.750	26.622.520	22.615.334
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	96.050.343	115.063.231	117.416.482	95.060.573	94.025.543
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	89.963.515	105.854.045	34.259.137	0	78.026.499
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	7.336.400	403.000	17.997.157	74.617.101	48.781.060
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	34.259.137	95.883.221	0
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>783.124.988</b>	<b>890.952.557</b>	<b>971.294.294</b>	<b>1.131.544.237</b>	<b>1.146.817.490</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>515.195.550</b>	<b>572.974.721</b>	<b>585.085.208</b>	<b>628.409.523</b>	<b>644.691.461</b>
1.1 Belanja Pegawai	432.626.792	456.198.002	477.641.196	456.967.596	469.194.072
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	51.821.910	34.722.283	2.649.800	59.623.733	58.807.807
1.5 Belanja Bantuan Sosial	2.407.500	1.511.500	1.926.000	0	2.097.825
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.219.296	8.354.294	6.650.221	7.827.433	7.814.618
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	27.007.417	72.188.642	96.110.002	103.716.413	106.777.139
1.8 Belanja Tidak Terduga	112.636	0	107.990	274.348	0
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>267.929.438</b>	<b>317.977.836</b>	<b>386.209.085</b>	<b>503.134.714</b>	<b>502.126.029</b>
2.1 Belanja Pegawai	11.255.085	16.865.673	20.600.125	19.193.903	17.755.621
2.2 Belanja Barang dan Jasa	156.857.982	181.773.764	221.501.353	295.144.509	334.519.452
2.3 Belanja Modal	99.816.371	119.338.399	144.107.607	188.796.302	149.850.956
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>96.103.817</b>	<b>138.677.227</b>	<b>149.867.330</b>	<b>108.594.136</b>	<b>70.311.736</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>98.853.817</b>	<b>142.277.227</b>	<b>154.861.330</b>	<b>115.919.136</b>	<b>76.811.736</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.703.817	141.802.227	154.861.330	115.644.136	76.011.736
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	150.000	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	800.000
1.8 Lainnya	0	475.000	0	275.000	0
<b>2 PENGULARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2.750.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>4.994.000</b>	<b>7.325.000</b>	<b>6.500.000</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	3.600.000	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.750.000	0	4.994.000	7.325.000	6.500.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>140.006.836</b>	<b>154.864.302</b>	<b>240.791.274</b>	<b>75.988.629</b>	<b>23.633.183</b>



Tabel 15. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>793.647.679</b>	<b>873.469.027</b>	<b>1.040.303.804</b>	<b>1.093.254.986</b>	<b>1.106.097.725</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>76.141.461</b>	<b>87.731.141</b>	<b>104.829.402</b>	<b>104.592.348</b>	<b>122.686.254</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	11.802.145	12.557.945	16.048.826	16.629.094	20.736.560
1.2 Hasil Retribusi Daerah	14.995.769	18.566.238	25.553.072	23.456.808	21.326.372
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.550.338	4.008.691	4.815.356	5.243.193	6.956.253
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.793.210	52.598.267	58.412.148	59.263.253	73.667.069
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>546.402.982</b>	<b>569.345.606</b>	<b>752.414.034</b>	<b>736.569.769</b>	<b>688.033.257</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	16.826.057	14.512.035	19.060.280	19.962.147	17.645.555
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	486.381.005	499.734.801	568.278.943	558.296.101	559.422.439
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	43.195.920	55.098.770	165.074.811	158.311.521	110.965.263
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>171.103.236</b>	<b>216.392.280</b>	<b>183.060.368</b>	<b>252.092.869</b>	<b>295.378.214</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	0	10.215.971	29.404.960	29.340.029
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	97.884.223	117.658.813	125.465.705	95.367.699	93.517.971
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	71.999.013	96.577.827	0	0	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.220.000	2.155.640	4.288.387	71.536.502	67.662.544
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	52.857.670
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	43.090.305	55.783.708	52.000.000
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>762.376.999</b>	<b>899.776.029</b>	<b>1.089.450.148</b>	<b>1.021.996.019</b>	<b>1.171.071.638</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>556.735.255</b>	<b>616.282.161</b>	<b>646.035.803</b>	<b>646.722.405</b>	<b>783.014.484</b>
1.1 Belanja Pegawai	417.521.985	475.644.606	518.950.035	444.993.765	482.322.601
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	61.031.213	45.155.081	8.239.307	17.610.320	28.981.450
1.5 Belanja Bantuan Sosial	3.255.000	1.080.000	2.214.280	3.854.024	3.095.000
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.420.830	3.335.672	3.709.836	4.326.734	4.260.111
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	71.375.085	91.066.802	112.855.906	175.738.250	264.355.322
1.8 Belanja Tidak Terduga	1.131.142	0	66.440	199.312	0
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>205.641.743</b>	<b>283.493.868</b>	<b>443.414.345</b>	<b>375.273.614</b>	<b>388.057.154</b>
2.1 Belanja Pegawai	19.937.561	46.406.486	61.246.105	60.063.422	50.198.219
2.2 Belanja Barang dan Jasa	115.486.913	126.373.661	131.942.216	156.599.346	156.657.374
2.3 Belanja Modal	70.217.269	110.713.721	250.226.024	158.610.846	181.201.561
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>96.836.097</b>	<b>127.941.507</b>	<b>86.555.239</b>	<b>31.649.497</b>	<b>102.910.529</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>101.336.097</b>	<b>127.941.507</b>	<b>103.455.210</b>	<b>37.012.847</b>	<b>102.910.529</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	100.203.467	127.941.507	103.455.210	37.012.847	102.910.529
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	1.132.630	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>4.500.000</b>	<b>0</b>	<b>16.899.971</b>	<b>5.363.350</b>	<b>0</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	4.500.000	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0	16.899.971	5.363.350	0
2.3 Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>128.106.777</b>	<b>101.634.505</b>	<b>37.408.895</b>	<b>102.908.464</b>	<b>37.936.616</b>





Tabel 16. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karangasem Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.248.392.023</b>	<b>1.367.577.564</b>	<b>1.462.024.349</b>	<b>1.525.846.347</b>	<b>1.482.949.917</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>239.425.005</b>	<b>243.125.914</b>	<b>232.644.013</b>	<b>198.575.057</b>	<b>200.361.247</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	138.541.746	139.626.191	117.782.188	96.850.262	91.995.241
1.2 Hasil Retribusi Daerah	13.022.203	14.255.154	15.984.975	12.579.622	13.199.321
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.064.083	13.535.055	13.592.314	11.519.621	10.750.651
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	70.796.973	75.709.514	85.284.536	77.625.552	84.416.034
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>695.408.544</b>	<b>706.426.130</b>	<b>937.628.022</b>	<b>949.134.029</b>	<b>937.885.910</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.141.103	17.307.499	22.447.406	23.233.118	20.959.758
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	614.793.461	633.241.287	732.963.859	722.184.384	729.378.991
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	60.473.980	55.877.344	182.216.757	203.716.527	187.547.161
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>313.558.474</b>	<b>418.025.520</b>	<b>291.752.314</b>	<b>378.137.261</b>	<b>344.702.660</b>
3.1 Pendapatan Hibah	3.509.238	79.127.259	73.937.390	57.937.129	57.763.757
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	95.553.641	105.387.045	102.832.588	115.364.651	125.012.273
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	142.071.021	178.178.534	49.301.984	71.182.742	99.489.619
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	72.414.169	55.317.714	65.670.951	130.625.907	59.442.092
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	10.405	14.968	9.401	3.026.832	2.995.019
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.164.666.358</b>	<b>1.351.846.275</b>	<b>1.450.662.759</b>	<b>1.506.221.683</b>	<b>1.480.600.621</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>761.203.217</b>	<b>889.847.572</b>	<b>929.460.208</b>	<b>879.475.826</b>	<b>899.612.964</b>
1.1 Belanja Pegawai	643.596.813	703.046.385	748.260.250	689.865.417	710.839.018
1.2 Belanja Bunga	6.262.865	4.458.177	2.580.813	633.650	22.985
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	32.191.765	41.061.315	5.882.089	11.370.600	6.151.450
1.5 Belanja Bantuan Sosial	2.418.500	675.828	901.010	1.461.164	2.144.566
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	19.805.558	16.286.253	13.730.310	9.484.944	13.260.787
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	56.927.716	123.735.350	158.105.736	165.834.010	164.631.943
1.8 Belanja Tidak Terduga	0	584.264	0	826.041	2.562.215
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>403.463.141</b>	<b>461.998.703</b>	<b>521.202.550</b>	<b>626.745.857</b>	<b>580.987.657</b>
2.1 Belanja Pegawai	16.731.571	27.540.823	30.270.433	22.141.110	25.041.533
2.2 Belanja Barang dan Jasa	209.173.812	256.033.241	300.494.138	367.534.861	411.039.361
2.3 Belanja Modal	177.557.758	178.424.639	190.437.979	237.069.886	144.906.763
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>71.668.610</b>	<b>127.129.691</b>	<b>114.446.431</b>	<b>102.921.920</b>	<b>118.476.077</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>101.416.983</b>	<b>155.856.074</b>	<b>142.694.804</b>	<b>125.692.990</b>	<b>122.206.950</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	101.396.976	155.844.274	142.685.297	125.641.509	122.184.280
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	20.007	11.800	0	51.481	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	9.507	0	22.670
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>29.748.373</b>	<b>28.726.383</b>	<b>28.248.373</b>	<b>22.771.070</b>	<b>3.730.873</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.000.000	4.978.010	4.500.000	3.600.000	3.600.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	23.748.373	23.748.373	23.748.373	19.171.070	130.873
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>155.844.274</b>	<b>142.860.980</b>	<b>125.808.022</b>	<b>122.546.584</b>	<b>120.825.373</b>



Tabel 17. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.543.584.631</b>	<b>1.937.771.345</b>	<b>2.066.173.156</b>	<b>2.200.113.190</b>	<b>2.052.836.001</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>219.682.330</b>	<b>293.038.467</b>	<b>282.113.900</b>	<b>455.195.426</b>	<b>335.555.494</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	85.017.340	110.723.083	102.239.173	124.234.062	133.652.474
1.2 Hasil Retribusi Daerah	12.684.819	19.944.242	15.129.372	17.076.084	19.056.987
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.740.066	12.657.529	15.030.437	14.141.580	13.029.559
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	110.240.105	149.713.612	149.714.918	299.743.700	169.816.474
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>947.573.267</b>	<b>983.333.688</b>	<b>1.305.606.678</b>	<b>1.313.915.838</b>	<b>1.245.134.580</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	28.142.809	26.264.579	29.020.240	27.927.638	28.566.413
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	854.532.248	868.511.959	982.698.080	965.435.235	965.435.235
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	64.898.210	88.557.150	293.888.359	320.552.965	251.132.932
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>376.329.034</b>	<b>661.399.189</b>	<b>478.452.578</b>	<b>431.001.926</b>	<b>472.145.927</b>
3.1 Pendapatan Hibah	0	1.958.000	0	19.098.000	93.307.359
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	152.730.072	194.472.620	204.521.694	163.566.162	162.184.905
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	218.781.224	463.880.846	246.211.291	161.193.237	141.789.777
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	4.350.000	777.662	27.719.594	87.017.797	74.858.186
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	0
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	467.738	310.062	0	126.730	5.700
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.558.960.849</b>	<b>1.865.996.555</b>	<b>2.200.205.551</b>	<b>2.122.121.858</b>	<b>2.064.477.377</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>1.024.745.249</b>	<b>1.121.044.573</b>	<b>1.274.346.716</b>	<b>1.165.260.447</b>	<b>1.146.308.020</b>
1.1 Belanja Pegawai	892.968.692	911.423.652	961.075.607	799.949.287	831.271.803
1.2 Belanja Bunga	21.751	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	28.672.500	34.159.908	81.808.234	87.731.850	71.953.975
1.5 Belanja Bantuan Sosial	4.115.000	4.500.000	0	595.390	5.261.400
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	8.207.840	9.880.038	15.347.391	16.400.000	17.297.397
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	83.733.566	160.890.165	214.928.828	255.766.877	220.523.445
1.8 Belanja Tidak Terduga	7.025.900	190.811	1.186.655	4.817.043	0
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>534.215.600</b>	<b>744.951.983</b>	<b>925.858.836</b>	<b>956.861.411</b>	<b>918.169.357</b>
2.1 Belanja Pegawai	29.705.058	54.131.113	56.958.806	42.559.182	45.856.734
2.2 Belanja Barang dan Jasa	320.882.679	464.500.743	523.752.143	619.081.519	668.002.464
2.3 Belanja Modal	183.627.864	226.320.127	345.147.887	295.220.710	204.310.159
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>108.688.273</b>	<b>91.254.055</b>	<b>162.504.812</b>	<b>15.860.272</b>	<b>68.117.091</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>111.631.932</b>	<b>93.312.055</b>	<b>162.604.812</b>	<b>26.558.272</b>	<b>93.843.091</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	111.631.932	93.312.055	162.604.812	26.558.272	93.843.091
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>2.943.659</b>	<b>2.058.000</b>	<b>100.000</b>	<b>10.698.000</b>	<b>25.726.000</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.700.000	2.058.000	100.000	10.698.000	25.726.000
2.3 Pembayaran Pokok Utang	243.659	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>93.312.055</b>	<b>163.028.844</b>	<b>28.472.417</b>	<b>93.851.604</b>	<b>56.475.715</b>



Tabel 18. Ringkasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.727.968.713</b>	<b>1.786.400.782</b>	<b>1.943.172.688</b>	<b>2.058.136.261</b>	<b>2.121.040.458</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>698.739.758</b>	<b>776.214.149</b>	<b>807.050.192</b>	<b>1.008.710.712</b>	<b>940.110.335</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	510.582.656	549.362.947	574.258.306	700.340.768	723.755.081
1.2 Hasil Retribusi Daerah	54.764.870	59.243.427	49.614.843	40.052.788	30.904.234
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.953.438	35.341.143	35.317.015	47.788.911	42.390.003
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.438.795	132.266.631	147.860.028	220.528.245	143.061.017
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>693.247.533</b>	<b>681.684.333</b>	<b>878.197.109</b>	<b>851.680.517</b>	<b>879.456.757</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	69.892.793	50.479.636	81.693.715	70.344.592	85.993.080
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	615.961.906	625.978.507	661.794.756	650.169.150	650.169.150
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	7.392.834	5.226.190	134.708.638	131.166.775	143.294.527
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>335.981.421</b>	<b>328.502.300</b>	<b>257.925.387</b>	<b>197.745.032</b>	<b>301.473.367</b>
3.1 Pendapatan Hibah	4.110.072	0	75.172.241	0	63.614.005
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	126.747.131	170.161.549	155.640.141	160.398.117	177.854.387
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	204.874.218	158.090.751	5.000.000	7.500.000	0
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	250.000	250.000	250.000	1.418.859	5.350.000
3.6 Dana Desa	0	0	0	0	27.404.975
3.7 Lain-lain Pendapatan yang Sah	0	0	21.863.005	28.428.056	27.250.000
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>1.648.378.769</b>	<b>1.757.644.194</b>	<b>1.871.440.897</b>	<b>1.967.311.319</b>	<b>2.098.037.222</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>903.436.801</b>	<b>1.034.937.556</b>	<b>1.037.975.540</b>	<b>1.041.281.701</b>	<b>1.077.335.323</b>
1.1 Belanja Pegawai	755.951.062	769.525.774	789.551.175	717.438.207	799.124.091
1.2 Belanja Bunga	0	0	0	0	0
1.3 Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
1.4 Belanja Hibah	46.883.417	87.123.626	53.396.265	99.761.657	76.509.349
1.5 Belanja Bantuan Sosial	162.500	2.723.500	3.460.600	2.625.220	3.669.400
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	29.044.000	29.044.000	57.917.772	63.053.038	68.853.538
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	71.371.172	146.440.463	128.894.438	158.354.579	128.983.786
1.8 Belanja Tidak Terduga	24.650	80.193	4.755.291	49.000	195.160
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>744.941.968</b>	<b>722.706.638</b>	<b>833.465.357</b>	<b>926.029.618</b>	<b>1.020.701.899</b>
2.1 Belanja Pegawai	14.758.938	17.551.898	17.911.640	24.302.185	21.679.967
2.2 Belanja Barang dan Jasa	496.141.308	512.835.219	557.885.790	650.101.466	740.613.275
2.3 Belanja Modal	234.041.722	192.319.521	257.667.927	251.625.967	258.408.656
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>202.344.527</b>	<b>214.951.519</b>	<b>168.233.832</b>	<b>234.630.826</b>	<b>300.364.137</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>222.364.871</b>	<b>281.934.472</b>	<b>246.301.607</b>	<b>239.965.694</b>	<b>326.593.002</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	222.364.871	281.913.662	243.708.107	239.965.694	325.455.768
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	2.593.500	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	0	20.810	0	0	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	1.137.234
1.8 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>20.020.344</b>	<b>66.982.953</b>	<b>78.067.775</b>	<b>5.334.868</b>	<b>26.228.865</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	19.999.306	66.982.953	78.067.775	5.334.868	26.228.865
2.3 Pembayaran Pokok Utang	21.037	0	0	0	0
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	0	0	0	0	0
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>281.934.472</b>	<b>243.708.107</b>	<b>239.965.623</b>	<b>325.455.768</b>	<b>323.367.374</b>



Tabel 19. Ringkasan Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>11.461.036.529</b>	<b>13.118.282.779</b>	<b>16.301.268.155</b>	<b>17.086.951.881</b>	<b>19.440.304.772</b>
1 PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.860.089.709	4.549.203.863	5.181.818.990	6.512.891.332	8.621.023.614
1.1 Hasil Pajak Daerah	2.942.159.031	3.422.480.277	3.832.813.519	4.810.890.695	6.587.079.466
1.2 Hasil Retribusi Daerah	255.437.829	267.093.902	313.996.735	306.821.552	366.199.453
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	162.188.518	198.244.290	226.103.844	336.573.195	359.009.745
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	500.304.331	661.385.394	808.904.891	1.058.605.891	1.308.734.949
2 DANA PERIMBANGAN	5.844.837.631	576.836.925	8.720.362.395	8.136.948.435	7.845.733.383
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	259.830.478	296.484.890	336.848.828	368.660.565	373.549.570
2.2 Dana Alokasi Umum (DAU)	5.202.034.053	5.249.585.922	5.916.618.559	5.973.602.100	5.823.545.145
2.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	382.973.100	381.516.540	2.466.895.008	1.794.685.770	1.648.638.668
3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.756.109.189	2.641.491.564	2.399.086.770	2.437.112.114	2.673.547.775
3.1 Pendapatan Hibah	2.056.248	0	195.690.947	122.886.007	359.446.020
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	777.025.922	1.091.618.295	1.330.155.378	1.242.297.766	1.109.199.106
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	823.283.792	1.465.441.715	695.024.829	755.416.533	840.822.078
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	130.431.848	79.320.484	150.352.137	280.036.243	569.760.686
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.311.379	5.111.070	27.863.479	36.475.565	27.250.000
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>12.448.638.938</b>	<b>13.936.249.170</b>	<b>17.389.385.449</b>	<b>18.841.822.771</b>	<b>21.129.008.534</b>
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG	7.325.033.676	8.824.140.413	10.124.942.503	9.810.169.567	11.214.096.011
1.1 Belanja Pegawai	5.897.710.220	6.824.110.017	7.626.377.916	6.621.826.554	6.966.226.985
1.2 Belanja Bunga	8.325.000	8.265.000	10.350.000	10.290.000	16.950.000
1.3 Belanja Subsidi	3.870.000	5.420.000	4.550.000	9.340.792	9.527.608
1.4 Belanja Hibah	318.140.301	517.643.029	370.275.326	752.668.658	1.124.689.681
1.5 Belanja Bantuan Sosial	67.984.107	62.666.043	57.292.411	85.260.498	276.883.868
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	337.940.887	401.513.984	506.651.646	614.647.632	840.211.696
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	671.811.187	987.161.313	1.530.029.504	1.696.591.439	1.949.090.315
1.8 Belanja Tidak Terduga	19.251.974	17.361.027	19.415.700	19.543.995	30.515.878
2 BELANJA LANGSUNG	5.123.605.262	5.112.108.757	7.264.442.946	9.031.653.205	9.914.912.523
2.1 Belanja Pegawai	248.135.093	299.007.129	370.512.310	422.575.431	426.519.636
2.2 Belanja Barang dan Jasa	2.556.767.548	2.620.405.931	3.503.635.718	4.590.147.898	5.648.656.275
2.3 Belanja Modal	2.318.702.621	2.192.695.697	3.390.294.918	4.018.929.875	3.839.736.613
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>988.296.112</b>	<b>215.632.438</b>	<b>1.189.780.327</b>	<b>1.754.870.890</b>	<b>1.688.703.762</b>
1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.063.972.551	957.931.118	1.455.805.503	1.863.386.760	1.787.833.434
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.057.959.657	952.293.224	1.298.715.940	1.480.408.525	1.551.210.767
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	150.000.000	317.000.000	231.222.667
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	59.913.672	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	62.894	0	664.563	664.563	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	62.894	0	0	0
1.8 Lainnya	5.950.000	5.575.000	6.425.000	5.400.000	5.400.000
2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	75.676.439	139.964.727	266.025.176	108.515.869	99.129.672
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	0	0	25.350.000	0	0
2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	45.083.439	108.871.727	210.995.176	48.707.706	65.379.672
2.3 Pembayaran Pokok Utang	25.393.000	25.893.000	24.080.000	51.033.163	28.350.000
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	3.375.000	0
2.5 Lainnya	5.200.000	5.200.000	5.600.000	5.400.000	5.400.000
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>693.703</b>	<b>0</b>	<b>101.663.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Tabel 20. Ringkasan Total Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota Se-Bali Tahun 2014 - 2018 (000 Rp)

Rincian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
<b>A PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>13.191.952.471</b>	<b>14.654.841.029</b>	<b>16.470.143.429</b>	<b>17.783.197.464</b>	<b>18.244.495.045</b>
<b>1 PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>4.842.700.555</b>	<b>5.377.762.614</b>	<b>6.086.850.948</b>	<b>7.303.473.416</b>	<b>7.601.456.606</b>
1.1 Hasil Pajak Daerah	3.507.060.540	3.891.972.288	4.334.304.614	5.129.370.804	5.615.466.858
1.2 Hasil Retribusi Daerah	321.278.766	325.836.952	320.066.942	313.799.423	331.414.145
1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	212.563.327	235.468.489	285.720.740	366.918.856	342.660.112
1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	801.797.923	924.477.885	1.146.758.652	1.493.384.332	1.311.915.492
<b>2 DANA PERIMBANGAN</b>	<b>5.838.330.818</b>	<b>5.881.930.984</b>	<b>7.831.945.296</b>	<b>7.801.295.966</b>	<b>7.663.870.128</b>
2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	270.573.611	219.858.842	321.745.524	305.819.359	321.463.409
2.2 Dana Alokasi Umum ( DAU )	5.202.034.053	5.249.585.922	5.916.618.568	5.814.778.940	5.822.785.189
2.3 Dana Alokasi Khusus ( DAK )	365.723.154	412.486.220	1.593.581.204	1.680.697.667	1.519.621.531
<b>3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.510.921.098</b>	<b>3.395.147.431</b>	<b>2.551.347.185</b>	<b>2.678.428.081</b>	<b>2.979.168.312</b>
3.1 Pendapatan Hibah	81.107.783	344.369.417	397.423.724	212.068.921	396.589.088
3.2 Dana Darurat	0	0	0	0	0
3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.045.604.285	1.277.011.636	1.181.264.543	1.036.784.569	1.203.917.081
3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	1.267.642.986	1.695.952.320	622.197.701	514.947.985	735.302.020
3.5 Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	92.750.569	65.078.981	167.248.456	691.233.541	441.455.035
3.6 Lain-lain Pendapatan yang Sah	23.815.476	12.735.077	176.212.762	223.393.065	82.250.719
<b>B BELANJA DAERAH</b>	<b>12.668.009.935</b>	<b>14.189.147.619</b>	<b>16.533.539.583</b>	<b>17.986.825.133</b>	<b>18.934.523.129</b>
<b>1 BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>7.624.550.751</b>	<b>8.637.940.756</b>	<b>9.340.713.622</b>	<b>9.799.040.663</b>	<b>10.718.866.798</b>
1.1 Belanja Pegawai	5.996.682.408	6.339.563.403	6.700.407.599	6.163.221.219	6.683.300.393
1.2 Belanja Bunga	6.338.150	4.502.374	2.612.207	3.616.311	11.241.138
1.3 Belanja Subsidi	3.837.400	5.393.600	4.378.338	7.476.568	5.770.880
1.4 Belanja Hibah	403.129.406	496.207.517	437.080.198	967.798.194	1.281.389.934
1.5 Belanja Bantuan Sosial	66.967.581	45.932.545	57.018.294	118.214.663	258.547.451
1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	380.099.373	456.919.401	560.004.843	686.129.737	730.814.038
1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	757.750.346	1.288.133.748	1.571.213.496	1.833.957.248	1.736.370.663
1.8 Belanja Tidak Terduga	9.746.088	1.288.168	7.998.647	18.626.723	11.432.300
<b>2 BELANJA LANGSUNG</b>	<b>5.043.459.184</b>	<b>5.551.206.863</b>	<b>7.192.825.962</b>	<b>8.187.784.470</b>	<b>8.215.656.330</b>
2.1 Belanja Pegawai	230.304.736	336.329.146	374.298.415	392.599.073	468.042.278
2.2 Belanja Barang dan Jasa	2.599.440.426	2.941.885.878	3.544.213.834	4.479.083.457	5.042.250.977
2.3 Belanja Modal	2.213.714.022	2.272.991.839	3.274.313.712	3.316.101.940	2.705.363.076
<b>C PEMBIAYAAN</b>	<b>1.676.395.313</b>	<b>1.786.336.357</b>	<b>2.088.753.191</b>	<b>1.924.410.235</b>	<b>1.630.983.308</b>
<b>1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1.912.690.724</b>	<b>2.212.791.302</b>	<b>2.255.623.134</b>	<b>2.012.981.577</b>	<b>1.749.346.849</b>
1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	1.899.479.326	2.204.919.524	2.251.417.953	1.894.909.759	1.720.299.990
1.2 Pencairan Dana Cadangan	0	455.618	0	0	0
1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah	370.926	0	0	113.865.537	26.654.186
1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	150.000	0	2.593.500	0	0
1.6 Penerimaan Piutang Daerah	621.676	776.697	651.670	51.481	0
1.7 Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	6.868.796	1.164.463	9.507	921.799	2.390.794
1.7 Lainnya	5.200.000	5.475.000	950.505	3.233.000	1.879
<b>2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>236.295.410</b>	<b>426.454.945</b>	<b>166.869.944</b>	<b>88.571.341</b>	<b>118.363.541</b>
2.1 Pembentukan Dana Cadangan	4.500.000	3.800.000	0	0	0
2.2 Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	202.504.306	393.828.537	142.534.172	65.641.644	78.304.865
2.3 Pembayaran Pokok Utang	24.091.104	23.826.408	23.826.408	19.249.105	28.333.908
2.4 Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
2.5 Lainnya	5.200.000	5.000.000	509.364	3.680.592	11.724.768
<b>D SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>2.236.787.121</b>	<b>2.252.029.767</b>	<b>2.025.357.036</b>	<b>1.720.782.566</b>	<b>940.955.225</b>

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BALI**

Jl. Raya Puputan No. 1 Renon, Denpasar- 80226

Telp: (0361) 2381, Fax: 23162

Email: [bps5100@bps.go.id](mailto:bps5100@bps.go.id)

Website: <http://bali.bps.go.id>

ISSN 2477-7773



9 772477 777006